

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018

Renstra Dinas Perhubungan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah yang merupakan suatu proses untuk menyusun dan menyepakati program dan kegiatan dengan melibatkan berbagai stakeholder dan masyarakat. Selanjutnya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022 memuat tentang visi, misi, gambaran umum Dinas Perhubungan, realisasi pelayanan, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, indikator, Strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan dan kinerja pelayanan yang akan dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017 - 2022 diharapkan dapat menjadi arah dan acuan bagi berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan perhubungan, baik dari kalangan aparatur itu sendiri, akademisi maupun masyarakat .

Cimahi, 2018

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI

RUSWANTO, ATD
Pembina Utama

NIP. 19691018 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2	Sumber Daya	10
2.3	Kinerja Pelayanan	12
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelanan	26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1	Permasalahan dan Isu Strategis	31
3.2	Visi, Misi dan Program	33
3.3	Telaahan Resntra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan	36
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS	38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan	41
4.2	Sasaran	41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi	43
-----	----------------	----

5.2	Arah Kebijakan	44
------------	-----------------------------	-----------

BAB VI RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN		47
6.1 Rencana		47
6.2 Program		47
6.3 Pendanaan		52
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		 53
 BAB VIII PENUTUP		 83

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1	Struktur Organisasi		9
2.	Gambar 2	Proses Pengujian Kendaraan Bermotor		23
3.	Gambar 3	Proses Perubahan bentuk dan status Kendaraan Bermotor		24
4.	Gambar 4	Proses Numpang Uji Kendaraan Bermotor		26

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon		10
2.	Tabel 2	Jumlah Pegawai Beradsarkan Golongan		10
3.	Tabel 3	Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan		11
4.	Tabel 4	Daftar Perlengkapan Jalan Tahun 2012 - 2017		Lamp
5.	Tabel 5	Daftar Trayek Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Cimahi		14
6.	Tabel 6	Daftar Terminal Dinas Perhubungan Kota Cimahi		16
7.	Tabel 7	Daftar Lokasi Titik Parkir di Kota Cimahi		18
8.	Tabel 8	Daftar Rekapitulasi Uji KIR di Kota Cimahi Tahun 2012-2017		22
9.	Tabel 9	Realisasi kegiatan Tahun 2012 - 2017		Lamp
10.	Tabel 10	Klasifikasi Jalan Bedasarkan Fungsi Jalan		31
11.	Tabel 11	Tujuan dan Sasaran		42
10.	Tabel 12	Analisis SWOT		43
11.	Tabel 13	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan		45
12.	Tabel 14	Tujuan dan Sasaran (Cas Cading Renstra)		Lamp
13.	Tabel 15	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif		Lamp

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di kota Cimahi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaringan aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022 dilaksanakan dengan melakukan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Cimahi 2017 – 2022. Dokumen Rencana Strategis harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen lainnya antara lain RPJMN, Renstra kementerian Perhubungan, Restra Dinas Perhubungan Propinsi, RTRW dan Renstra Dinas Perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang akan digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya akan dilaksanakan selama satu tahun dan kemudian akan digunakan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 diharapkan dapat menjawab terhadap tuntutan masyarakat Kota Cimahi akan sistem transportasi yang andal, yaitu dalam penyelenggaraan transfortasinya dapat memberikan rasa aman, nyaman, lancar, berkeselamatan berdasarkan prinsip berkeadilan keterjangkauan, dan berwawasan lingkungan, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan

bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara bersama oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan jajarannya guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan ;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu lintas & Angkutan Jalan
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.;
17. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi ;
18. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Cimahi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Perhubungan :

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) Tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor perhubungan. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun sebagai acuan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.

Berkaitan dengan itu juga Rencana Strategis Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017 -2022 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja Dinas Perhubungan, menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi
5. Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang andal, yang memberikan rasa aman, nyaman dan berkeselamatan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.

Tujuan Penyusunan Renstra Perhubungan :

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja dan kegiatan Dinas Perhubungan, meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah Kota Cimahi terutama di sektor perhubungan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kegiatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan mendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Dinas Perhubungan Kota Cimahi beserta indikator kinerjanya

4.3 Sasaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan sasaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam lima tahun mendatang.

V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam 5 (lima) mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sehingga Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Wali Kota.

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kota Cimahi.

Tugas,

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
2. Perumusan Perencanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.

4. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang perhubungan
5. Pengelolaan administrasi kesekretariatan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi

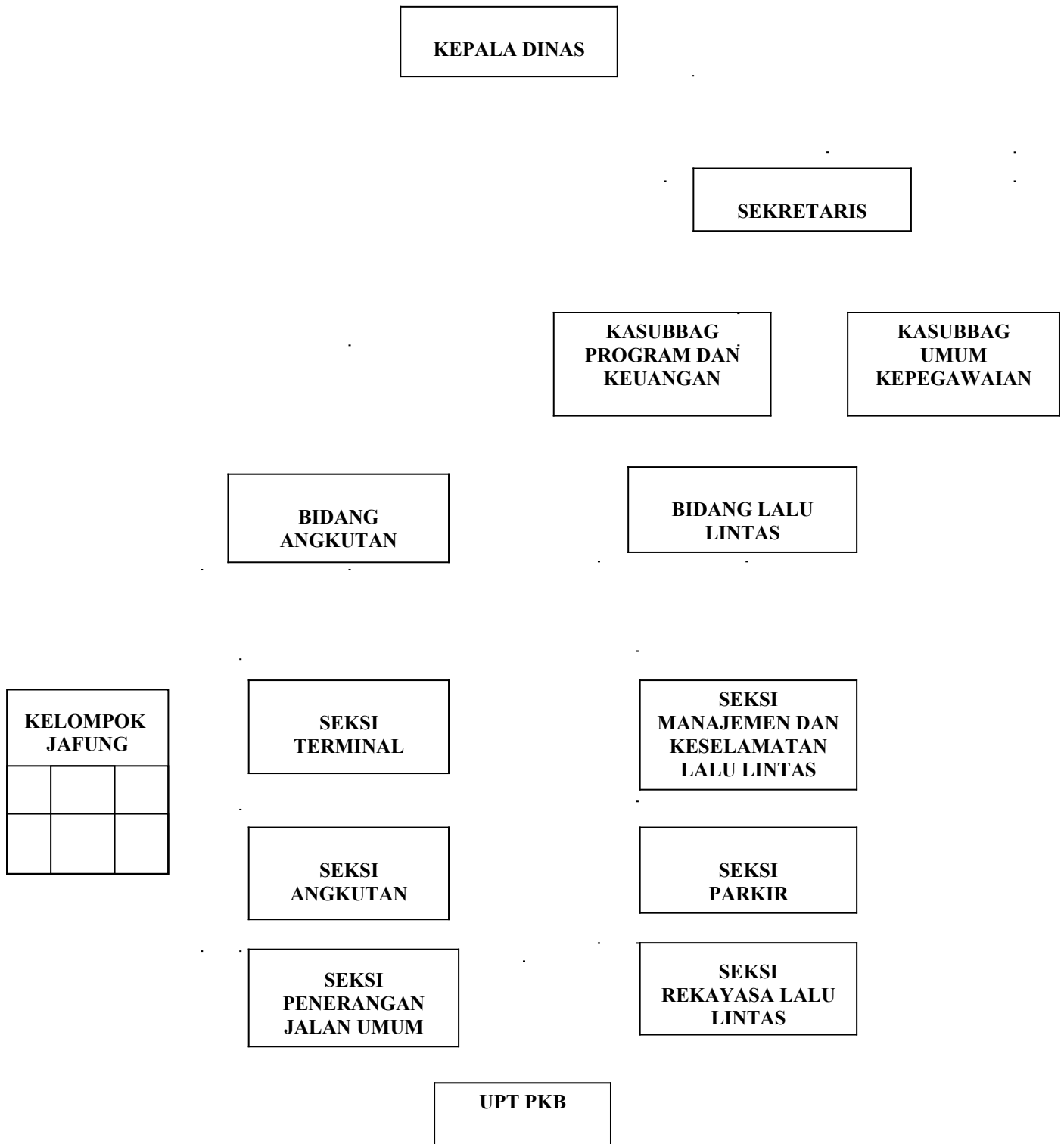
Dinas Perhubungan Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kasubag Program dan Keuangan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Terminal
 - b. Kepala Seksi Angkutan
 - c. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum
4. Kepala Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Kepala Seksi Perparkiran
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor.
Kasubag Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Jabatan Fungsional

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat dilihat dalam Gambar 1 dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
PEMERINTAH KOTA CIMAHI**



2.1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Dinas Perhubungan didukung dengan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| 1. PNS | : | 79 orang |
| 2. THL | : | <u>53</u> orang |
| Jumlah..... | : | 131 orang |

Untuk lebih jelasnya komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IIb			1	1	1
1.	III a	1	1	1	1	1
2.	III b	3	3	3	3	3
3.	IV a / IV b	10	8	11	11	10
JUMLAH		14	12	16	16	15

Tabel 2
Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	IV c	0	0	1	1	1
2.	IV b	1	2	2	2	1
3.	IV a	4	4	3	4	3
4.	III d	11	8	8	6	5
5.	III c	1	2	5	6	5
6.	III b	8	8	8	8	6
7.	III a	3	5	6	7	9
8.	II d	8	7	5	5	6
9.	II c	6	6	21	34	31
10.	II b	39	47	29	14	8
11.	II a	12	3	4	6	3
12.	I d	2	1	1	1	1
13.	I c	1	2	2	2	
14.	I b	2				
15.	I a					

JUMLAH	98	95	95	96	79
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tabel 3
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	S 2	3	7	11	9	9
2.	S 1	20	18	20	20	17
3.	D IV					
4.	D III	10	14	11	12	8
5.	D II	1	1	1	1	1
6.	SLTA	60	51	48	46	42
7.	SLTP	1	1	1	2	1
8.	SD	3	3	3	3	1
JUMLAH		98	96	95	93	79

2.2 Sarana Parasana Dinas Perhubungan

Sarana prasarana yang menunjang kegiatan Dinas Perhubungan antara lain :

a. Sarana

- Kantor Dinas Perhubungan
- Gedung Bidang Lalu Lintas
- Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
- Gedung Terminal Tipe C

b. Prasarana

- Kendaraan Operasional Roda 4 : 6 Buah
- Kendaraan Operasional Roda 2 :
- Kendaraan Crane : 1 unit
- Kendaraan Double cabin dan sigle Cabin : 2 unit
- Kendaraan Derek : 1 unit

c. Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU, PJJ, dan PJG).

Pengadaan perlengkapan jalan dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis 2012

– 2017. Daftar penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana terlampir dalam tabel 4 (Lampiran).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2017 - 2022 diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pencapaian target kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan selama kurun waktu 2012 – 2017. Di samping itu perlu dicermati permasalahan dan tantangan yang berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Pemetaan awal terhadap pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2012-2017 merupakan dasar kebijakan lanjut untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2017 - 2022. Sejalan itu, diperlukan pengamatan dan analisis terhadap pengaruh lingkungan strategis yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, baik internal maupun eksternal. Pengaruh strategis internal akan diformulasikan dalam bentuk kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh strategis eksternal akan diformulasikan dalam bentuk peluang dan ancaman.

Dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan lingkungan strategis serta mencermati pencapaian, maka di dalam penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan Dinas Perhubungan 2017-2022 akan dirumuskan langkah-langkah kebijakan lanjut dalam mencapai target kinerja pelayanan serta memperjelas arah tugas pokok dan fungsi yang akan dirumuskan Visi yang dijabarkan ke dalam Misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut diformulasikan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan arah kebijakan.

Dinas Perhubungan berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas khususnya pada bidang transportasi kepada masyarakat Kota Cimahi dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi. Perda Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu lintas & Angkutan Jalan dan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2012 – 2017, dalam rangka meningkatkan penataan lalu lintas dan penegakan hukum serta meningkatkan infrastruktur kota adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Pelayanan pengamanan / pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas
3. Bimbingan keselamatan dan penyuluhan tata tertib lalu lintas
4. Perencanaan transportasi (Tata guna lahan, Angkutan umum, Jaringan jalan)
5. Pelayanan manajemen dan rekayasa lalu lintas
6. Pelayanan antisipasi titik-titik rawan kemacetan
7. Pelayanan terminal dan parkir
8. Penetapan tarif angkutan umum
9. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas pendukungnya
10. Analisis dampak lalu lintas terhadap setiap bangunan baru yang mengakibatkan tarikan dan bangkitan lalu lintas
11. Pengembangan dan pembangunan melalui Infrastruktur penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan, dan penerangan jalan gang yang tersebar di wilayah kota cimahi

2.3.1. Pelayanan Angkutan

Bidang angkutan merupakan salah satu bidang pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang mempunyai tugas pokok memberikan Pelayanan di bidang angkutan berupa surat rekomendasi yang terdiri dari :

- a. Menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek di wilayah Kota Cimahi.
- b. Menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di wilayah Kota Cimahi.

Daftar Trayek Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Cimahi sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 5, dibawah ini :

Tabel 5
Daftar Trayek Angkutan Umum
Dinas Perhubungan Kota Cimahi

1. TRAYEK DALAM KOTA CIMAHI

NO	NAMA TRAYEK	JARAK	REALISASI
1	PASAR ANTRI – LEUWIGAJAH- CIMINDI	8	158
2	PASAR ANTRI - CIBEER VIA BAROS	12	142
3	PASAR ANTRI - CIBEER VIA CONTONG	14	103
J U M L A H			403

2. TRAYEK PERBATASAN

NO	NAMA TRAYEK	JARAK	REALISASI
1	CIMAHI (PSR. ANTRI) - CIWARUGA (KAB. BANDUNG)	10	91
2	CIMAHI (PSR. ANTRI) - CIMAREME - BATUJAJAR - CILILIN (KAB.BANDUNG)	29	176
3	CIMAHI (PSR. ANTRI) - PARONGPONG (KAB. BANDUNG)	17	130
4	CIMAHI (PSR. ANTRI) - PATROL - SOREANG (KAB. BANDUNG)	25	69
5	CIMAHI (PSR. ANTRI) - PADALARANG (KAB. BANDUNG)	12	124
6	CIMAHI (PSR. ANTRI) - CIMAREME - BATUJAJAR (KAB. BANDUNG)	19	131
7	CIMAHI (PSR. ATAS) - CIPAGERAN - P. PERMATA - CILAME (KAB. BANDUNG)	16	26
8	CIMAHI (PSR. ATAS) - CIAWITALI - CIUYAH - PADA ASIH - PSR. BAROKAI (KAB. BANDUNG)	13	24
9	CIMAHI (PSR. ATAS) - CISARUA (KAB. BANDUNG)	7	107
10	CIMAHI (CIMINDI) - NANJUNG -	12	209

11	CIPATIK (KAB. BANDUNG) CIMAHI (CIMINDI) - MARGA ASIH (KAB. BANDUNG) VIA CIBALIGO CIMAHI (SANGKURIANG) -	8	57
12	LEUWIGAJAH - CISEUPAN -	15	42
13	CANGKORAH - BATUJAJAR (KAB. BDG) CIMAHI (PSR. ATAS) - CIDAHU - TANI MULYA - PAKUHAJI (KAB. BANDUNG) CIMAHI (MELONG ASIH) - CIJERAH	10	32
14	(KOTA BANDUNG) - ELANG (KOTA BANDUNG) CIMAHI (PESANTREN) - JL. LEMBUR	8	60
15	TENGAH (KAB. BANDUNG) - SARIJADI (KOTA BANDUNG)	12	50
16	CIMAHI - TANIMULYA - CILAME (CTC)	14	9
J U M L A H			1180

2. TRAYEK AKDP (LINTASAN)

NO	NAMA TRAYEK	JARAK	ALOKASI	REALISASI
1	LEUWIPANJANG - CIMAHI (PASAR ANTRI) – SANGKURIANG	12	1150	602
2	LEUWIPANJANG - CIMAHI (PASAR ANTRI) - PADALARANG – SANGKURIANG	18	600	598
3	ST. HALL - CIMAHI (PASAR ANTRI) – SANGKURIANG	12	780	456
4	ST. HALL - CIMAHI (PASAR ANTRI) - PADALARANG – SANGKURIANG	18	400	355
JUMLAH				2011

2.3.2. Pelayanan Terminal

Pelayanan dan pengelolaan terminal di Kota Cimahi sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi transportasi perkotaan, mobilitas orang dan barang serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi terminal. Adapun sistem pemungutan retribusi terminal sesuai dengan trayek yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Daftar Terminal
Dinas Perhubungan Kota Cimahi

No	Terminal	Lokasi	Trayek Yang Dilayani
1	Terminal Cimindi	Pasar Cimindi	- Trayek Cimindi – Cipatik - Trayek Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi - Trayek Cimindi – Marga Asih Via Cibaligo - Trayek Melong Asih – Elang
2	Terminal Pasar Atas	Pasar Atas	- Trayek Pasar Atas – Cisarua - Trayek Pasar Atas – Cidahu – Pakuhaji - Trayek Pasar Atas – Ciuyah – Permata - Cilame - Trayek Pasar Atas – Padaasih - Trayek Pasar Atas – Tani Mulya
3	Terminal Sangkuriang	Jl. Sangkuriang	- Trayek Cimahi – Padalarang - Trayek Cimahi – Batujajar - Cililin
4	Terminal Pasar Antri Baru	Pasar Antri	- Trayek Pasar Antri – Cibeber Via Contong - Trayek Pasar Antri – Cibeber Via Baros - Trayek

			Pasar Antri – Lembur Tengah - Sarijadi
		-	Trayek
		Pasar Antri –	Ciwaruga -
		Ledeng	
		-	Trayek
		Pasar Antri -	Cipatik - Soreang
		-	Trayek
		Pasar Antri –	Cangkorah
		-	Trayek
		Pasar Antri –	Parongpong
		-	Trayek
		Pasar Antri –	Ciwaruga –
		Ledeng	

Pada bulan Pebruari 2017, setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan dengan beberapa dinas, pelayananan retribusi terminal Sangkuriang dihentikan karena status tanah tersebut bukan merupakan aset Pemerintah Kota Cimahi dan hanya merupakan lintasan angkutan umum, sedangkan pelayanan terminal di pasar Atas dihentikan dikarenakan pada saat ini, Pasar Atas sedang dalam pembangunan, dimana terminalnya pun turut dibongkar. Pemberhentian pemungutan retribusi di terminal Sangkuriang dan Pasar Atas telah disampaikan kepada Wali kota dan DPRD Kota Cimahi.

2.3.3. Pelayanan dan Pengelolaan Parkir

Salah satu strategi yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah kesemrawutan lalu lintas adalah dengan melaksanakan pengelolaan dan penataan pelayanan perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah mengambil langkah-langkah penataan perparkiran dengan melaksanakan Inventarisasi tempat-tempat pemungutan retribusi parkir (titik parkir) pada ruas – ruas jalan, sebagai berikut :

Tabel 7

DAFTAR LOKASI TITIK PARKIR DI KOTA CIMAHI TAHUN 2017

NO	LOKASI PARKIR	RUAS JALAN
1	Depan Rumah Makan Sunda (ganti Apotik	Jl. Jend. H. Amirmachmud

	Abadi).	
2	Depan Bank Mandiri	Jl. Jend. H. Amirmachmud
3	Depan Cimahi Motor	Jl. Jend. H. Amirmachmud
4	Depan Ramayana I	Jl. Ramayana
5	Depan Ramayana II	Jl. Ramayana
6	Depan Ramayana III	Jl. Ramayana
7	Depan SDN Mandiri I s/d Ramayana (Baso Malang)	Jl. Alun-alun Kota Cimahi
8	Depan Rio (Dunkin Donat)	Jl. Ria
9	Depan Toko Asin	Jl. Pasar Atas
10	Depan Rio Alun-alun I	Jl. Alun-alun Kota Cimahi
11	Depan Rio Alun-alun II	Jl. Alun-alun Kota Cimahi
12	Depan Rio Alun-alun III	Jl. Alun -alun Kota Cimahi
13	Depan Tk. Pertiwi	Jl. Jend. H. Amirmachmud
14	Depan Pasar Baros	Jl. Baros
15	Depan Bandung Photo	Jl. Gedung Empat
16	Depan PAB Pasar Atas	Jl. Dra. Djuleha
17	Depan Puskemas Cimahi Tengah	Jl. Dra Djulaeha
18	Depan Tk. Roti Merdeka	Jl. Gatot Soebroto
19	Depan Bank BRI	Jl. Amir Macmhud
20	Samping Pasar Atas I	Jl. Pasar Atas
21	Depan Salon Lia	Jl. Dustira
22	Depan Pos Giro Pasaar Atas	Jl. Pasar Atas
23	Depan Toko Ridho	Jl. Kolonel Masturi
24	Depan Toko Tani Jaya	Jl. Kolonewl Masturi
25	Depan Apotek Mandira	Jl. Kolonel Masturi
26	Depan Pujasera Pasar Atas	Jl. Pasar Atas
27	Depan Indomart Citeureup	Jl. Kolonel Masturi
28	Samping Pasar Atas II	Jl. Pasar Atas
29	Depan Bank bukopin	Jl. Jend Amir Mahmud
30	Depan RM.Paku Haji	Jl. Jend Amir Mahmud
31	Depan Tk. Kue Amanda	Jl. Jend Amir Mahmud
32	Depan RM Ceker Midun	Jl, Amir Machmud
33	Depan Alfamart Alun-alun s/d Mie Tegalega	Jl. Jend. H. Amirmachmud
34	Depan RM Baso Bujangan	Jl. Central Cibabat
35	Depan Apotek Budhi Rahayu	Jl. Jend. H. Amirmachmud
36	Depan Apotek Cimindi	Jl. Mahar Martanegara
37	Depan Pangkas Rambut	Jl. Dustira
38	Depan Apotik Primad	Jl. Dustira
39	Depan Apotek Rama Farma	Jl. Jend. H. Amirmachmud
40	Depan SDN Mandiri 1	Jl. Pabrik Aci

41	Depan CS Finace	Jl. Jend. H. Amirmahmud
42	Depan Toko Agist - Apotek	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
43	Gg. H. Arsad s/d RM. Padang Gebu Minang	Jl. Jend. H. Amirmachmud
44	Depan Tk. 72	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
45	Depan Tk. Dwijaya	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
46	Depan Yohan Photo	Jl. Jend. H. Amirmachmud
47	Depan RM. Pak Kumis	Jl. Kolonel Masturi
48	Depan TB. Jaya Makmur	Jl. Jend. H. Amirmachmud
49	Depan Tk. Citra Atas	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
50	Depan Tk. Citra Bawah	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
51	Depan Tk. Colombus	Jl. Jend. H. Amirmachmud
52	Depan Tk. Kurnia	Jl. Jend. H. Amirmachmud
53	Depan Yomart - Warteg	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
54	Depan Istana Variasi	Jl. Amir Mahmud
55	Depan Aska Jaya Cell	Jl. Amir machmud/ Jl. Cimindi
56	Depan Tk. Mas Bagus	Jl. Maharmartanegara
57	Depan Alfamart Jati	Jl. Daeng Muhamad Ardiwinata / Jl. Cihanjuang
58	Depan Apotek Mahkota/Tk. Star	Jl. Gandawijaya
59	Depan Apotek Utama Jaya	Jl. Gandawijaya
60	Depan Apotek Wulandari	Jl. Gatot Soebroto
61	Depan Baso Lampu Merah	Jl. Gandawijaya
62	Depan Batagor Iksan	Jl. Gatot Soebroto
63	Depan Bengkel Tiga Berlian	Jl. Gatot Soebroto
64	Depan Serumpun Bambu	Jl. Gatot Soebroto
65	Depan RM .Soto Solo	Jl. Gatot Soebroto
66	Depan SMAN 5	Jl. Gatot Soebroto
67	Depan Telkom Gatot Subroto	Jl. Gatot Soebroto
68	Depan Tk. Cahaya Abadi	Jl. Gandawijaya
69	Depan Tk. Emas Murni	Jl. Gandawijaya
70	Depan Tk. Hade	Jl. Gandawijaya
71	Depan Tk. Jam Saudara	Jl. Gandawijaya
72	Depan Tk. Muda-Mudi	Jl. Gandawijaya
73	Depan Tk. Serba Indah	Jl. Gandawijaya
74	Depan Baso Inti	Jl. Gatot Soebroto
75	Depan Baso Margana s/d Toko Buana	Jl. Gandawijaya
76	Depan Toko Obras	Jl. Gandawijaya

77	Depan Aming Motor	Jl. Gatot Soebroto
78	Depan Pujasera	Jl. Jati Serut
79	Depan Tk. Jati Indah	Jl. Gandawijaya
80	Depan Toko Kerajinan	Jl. Gandawijaya
81	Depan Toko Raos	Jl. Gandawijaya
82	Depan Pelangi Leuwigajah	Jl. Mahar Martanegara / Jl. Leuwigajah - Cimindi
83	Depan UGD Dustira	Jl. Dustira
84	Depan PKB Baros	Jl. Akses Tol Baros
85	Depan Toko Diar Motor	Jl. Amirmachmud /Cimindi
86	Depan Pasar Cimindi	Jl. Maharmartanegara
87	Depan Lapang Voly CCH	Jl. Demang Hardjakusumah
88	Depan Toko Plastik	Pasar Atas dan sekitarnya
89	Depan T.B Persahabatan	Pasar Atas dan sekitarnya
90	Depan Toko Sayagi s/d Pasar Atas Baru	Pasar Atas dan sekitarnya
91	Depan Seberang T.B Sayagi	Pasar Atas dan sekitarnya
92	Depan Toko Inti Logam	Pasar Atas dan sekitarnya
93	Depan PAB Pasar Atas	Pasar Atas dan sekitarnya

2.3.4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor`

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara tetap/stasioner di Unit PKB Baros, mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang relatif kecil. Dalam implementasinya pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara fungsional oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidangnya dan telah memiliki sertifikat berdasarkan akreditasi dari Departemen Perhubungan.

Sebagai salah satu unit pelayanan publik di bidang perhubungan, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi telah memenuhi standar pelayanan minimal dengan telah dilengkapinya sarana dan prasarana penunjang berupa gedung unit dan peralatan uji mekanik, sehingga pemeriksaan kendaraan dapat memenuhi standar minimal validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2006, terdiri dari :

- a. Uji Pertama
- b. Uji Berkala
- c. Penilaian Teknis Kendaraan

- d. Numpang Uji Keluar
- e. Mutasi antar Daerah
- f. Rubah Bentuk Kendaraan
- g. Rubah Status Kendaraan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang menjadi obyek pengujian (kendaraan wajib uji) adalah sebagai berikut :

- a. Bus, mobil penumpang
- b. Mobil Barang/khusus
- c. Kendaraan Roda 3

Fasilitas penunjang yang telah dimiliki berupa :

- a. Peralatan uji, terdiri dari :
 - Exhaust Gas Analyzer (petrol only)
 - Smoke Meter (diesel only)
 - Head Light Tester (uji lampu utama)
 - Break Tester & Exle Load (uji efisiensi rem & berat sumbu)
 - Joint Play Detector (uji suspensi kendaraan)
 - Timbangan portable (timbangan berat kendaraan keadaan kosong)
 - Generator Set (pembangkit daya listrik)
 - Kompresor Angin
 - Sistem Informasi dan Manajemen PKB (program dan data base kendaraan)
- b. Bangunan uji, Terdiri dari :
 - Bangunan Jalur Uji
 - Bangunan Pelayanan Administrasi
 - Bangunan Ruang Tunggu / Kantin / Koperasi
 - Mushola dan Ruang Wudhu serta WC
 - Bangunan ornamen Fascade

c. Sumber daya manusia, yang menunjang pelaksanaan pelayanan PKB adalah sebagai berikut:

- Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Struktural)
- Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Struktural)
- 8 (Delapan) orang tenaga penguji (Fungsional)
- 5 (lima) orang tenaga pelaksana teknis dan administrasi
- 12 (Dua Belas) orang tenaga honorer pelaksana teknis dan administrasi

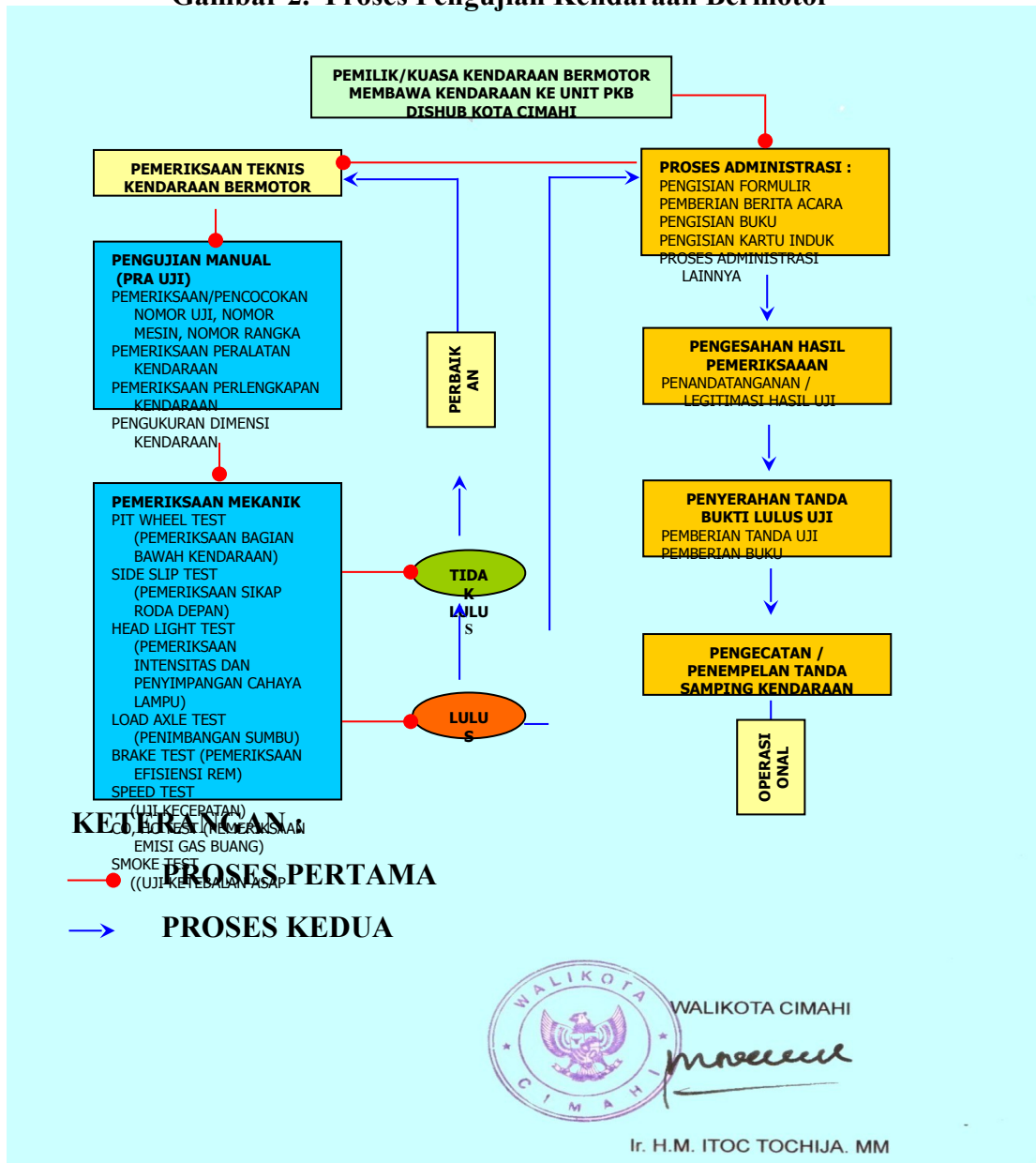
Tabel 8
Daftar Rekapitulasi Uji KIR di Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017

No	Jenis Kendaraan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Mobil Bis	2015	2122	2110	2013	1724	1880
2	Mobil Barang	6461	6827	7243	7611	7613	7291
3	Mobil Khusus	8725	140	154	128	156	144
4	Mobil PNP OT	33	32	33	130	221	234

Prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

a. Proses pelayanan pengujian untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut :

Gambar 2. Proses Pengujian Kendaraan Bermotor

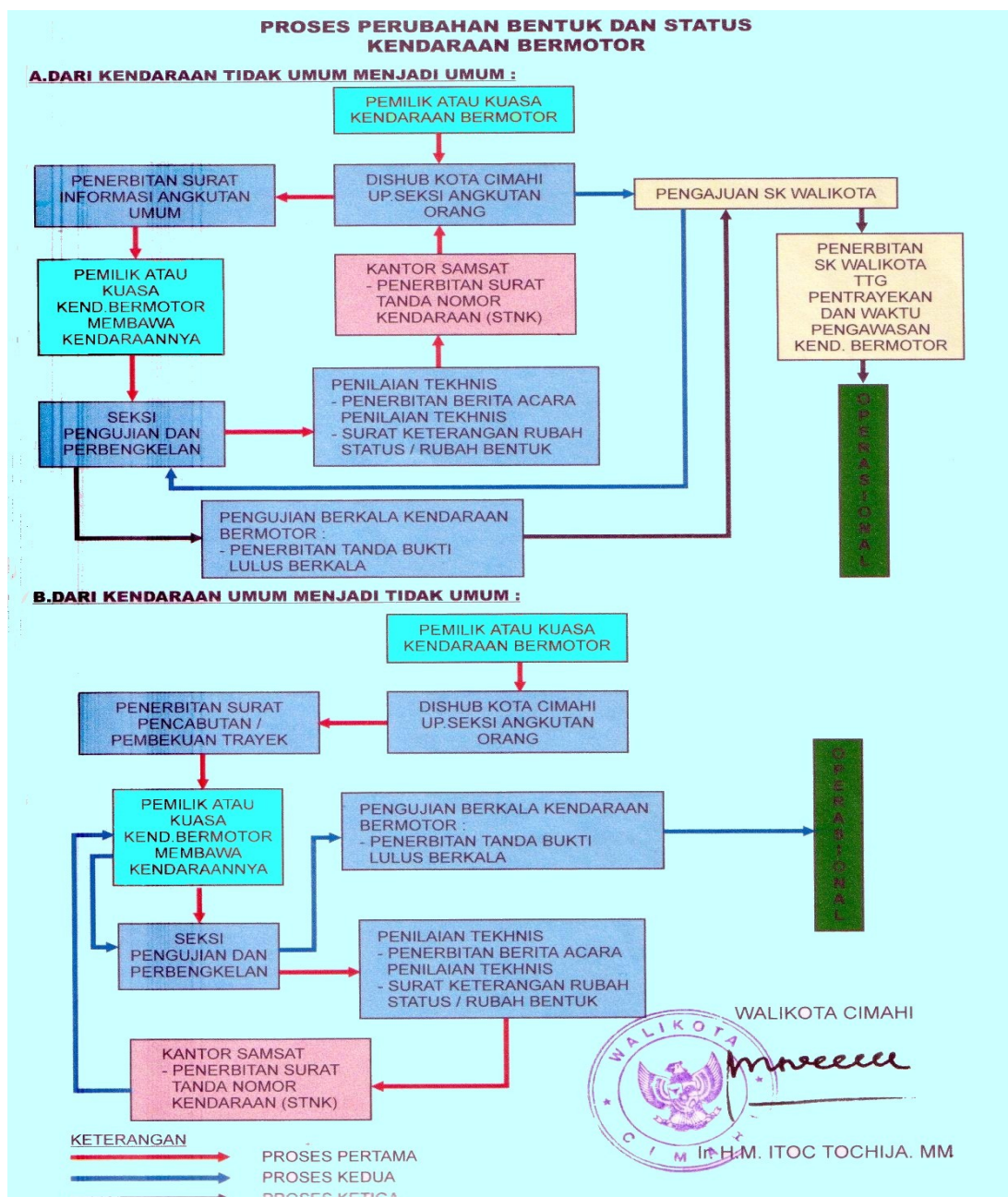


b. Proses Perubahan Bentuk dan Status Kendaraan Bermotor

Proses Perubahan Bentuk dan Status Kendaraan Bermotor untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini :

Gambar 3.

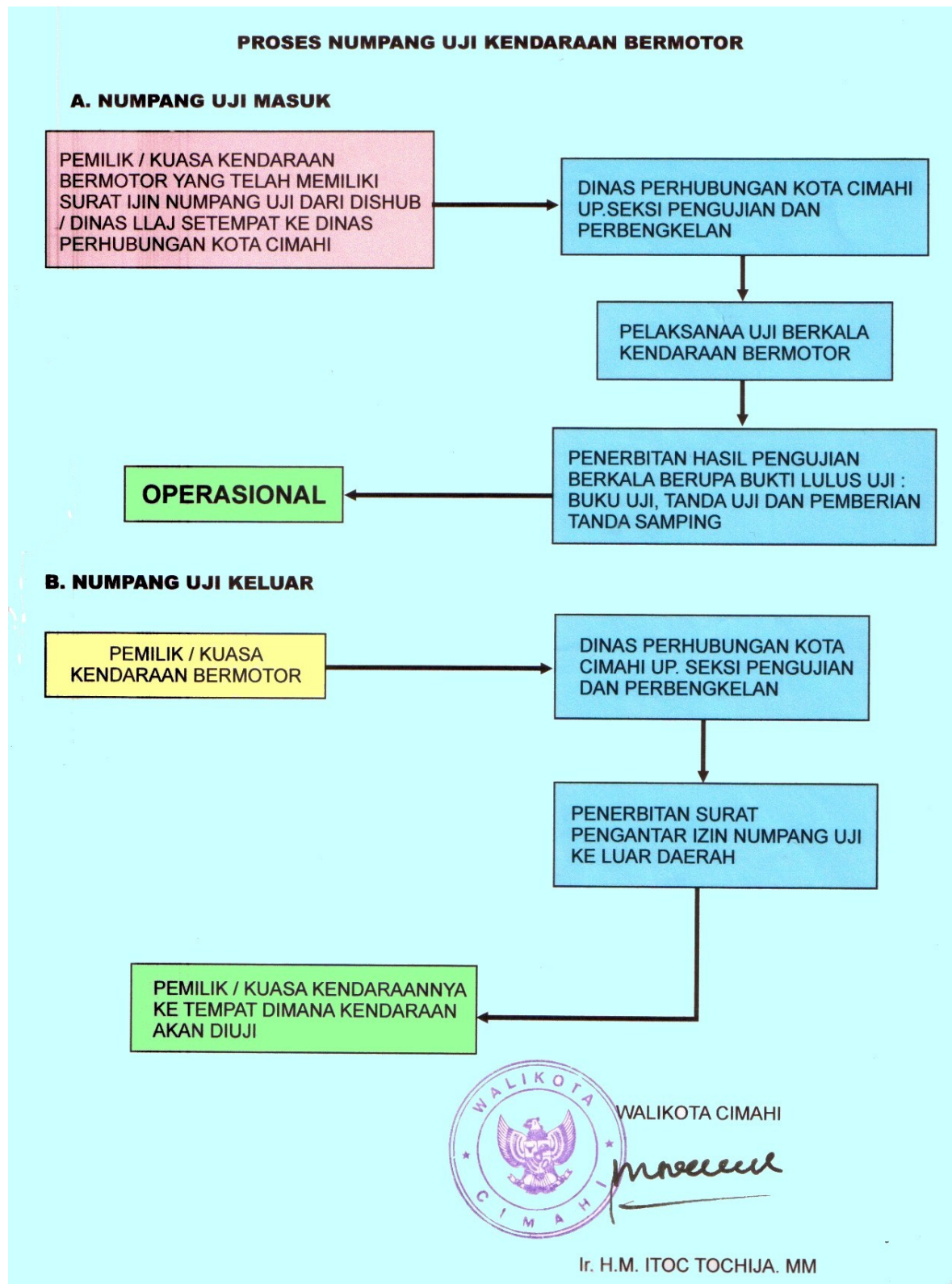
Proses Perubahan bentuk dan Status Kendaraan Bermotor



c. Proses Numpang Uji Kendaraan Bermotor

Proses Numpang Uji Kendaraan Bermotor untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini :

Gambar 4. Proses Numpang Uji Kendaraan Bermotor



Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang perhubungan Kota/kab yaitu :

1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota.
2. Tersedianya Halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kota.
5. Tersedianya unit Pengujian Kendaraan bermotor.
6. Tersedianya SDM di bidang terminal.
7. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa LaluLintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan sasaran/target renstra Dinas Perhubungan periode 2012 - 2017 , disajikan sebagaimana terlampir dalam Tabel 9 (Lampiran).

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan

Proses penyusunan Rencana Strategis perlu memperhatikan tantangan dan peluang yang mempengaruhi dalam mencapai target pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan, sehingga berdasarkan tantangan dan peluang tersebut dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mencapai target pelayanan yang akan disusun selanjutnya. Adapun tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

▪ Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kegiatan dalam melaksanakan kegiatan tahunan yang telah disusun 5 (lima) tahun. Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain:

1. Kota Lintasan

Kondisi umum sistem jaringan jalan Kota Cimahi, menunjukkan bahwa sistem jaringan jalan kota utama berfungsi menghubungkan pusat Kota Cimahi dengan Kota Bandung di bagian utara, Kabupaten Bandung di bagian selatan dan Kab. Bandung Barat di bagian barat, sehingga sebagai kota lintasan akan dilalui kendaraan dari cimahi dan keluar cimahi melalui ruas jalan utama mengakibatkan kesemerawutan dan tingginya angka kecelakaan.

2. Keterbatasan Infrastruktur : panjang jalan, lebar jalan, keterbatasan jaringan Infrastruktur transportasi terdiri dari jalan dan perhubungan. Jaringan jalan di Kota Cimahi terdiri dari jalan tol, jalan Nasional/Provinsi, jalan kota, dan jalan perumahan dan permukiman berupa gang. Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (fish bone), karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke jalan raya cimahi/nasional sebagai jalan utama. Jalan ini harus menampung muara pergerakan menerus. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan beban penggunaan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam sibuk/puncak.
3. Pertumbuhan kendaraan
Pertumbuhan kendaraan pribadi dan motor cukup tinggi karena adanya kemudahan kepemilikan/kredit kendaraan, juga akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota Cimahi, dimana Angkutan Kota dan Angkutan Perkotaan AKDP menambah volume lalu lintas semakin padat (karena terjadinya campuran lalu lintas /mixed traffic yang tinggi) dan berdampak terhadap in-efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Cimahi.
4. Keterbatasan penyediaan terminal
Susahnya mencari lahan dan tingginya harga lahan mengakibatkan pengadaan lahan untuk pembangunan terminal terkendala, selain itu terminal penumpang sebagai simpul transportasi dan bagian pelayanan angkutan umum tidak mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada pengguna jasa terminal (kendaraan angkutan umum maupun calon pengguna jasa angkutan umum), dikarenakan kondisi infrastruktur yang ada kurang memadai.

5. Keterbatasan penyediaan angkutan

Manajemen perusahaan angkutan kota masih bersifat tradisional karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan masih rendah dan kurangnya ketertarikan pihak swasta dalam penyediaan angkutan kota.

6. Keterbatasan lahan parkir

Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya karena keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak yang berkepentingan, seperti sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya serta susahny mencari lahan untuk kantong parkir.

7. Harapan masyarakat dalam pelayanan

Masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan ijin trayek, pengujian kendaraan bermotor, transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

8. Dalam persaingan global yang diwarnai dengan kecanggihan teknologi yang tinggi, maka sektor transportasi dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.

■ **Peluang**

Peluang adalah kesempatan yang mempengaruhi pencapaian target kegiatan dalam melaksanakan kegiatan 5 (lima) tahunan. Adapun peluang antara lain :

1. Regulasi

Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dan memperjelas peran regulator dalam pelayanan transportasi publik.

2. SDM dan kesadaran masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM Dinas Perhubungan yang mempunyai kualifikasi di bidang transportasi dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam berlalu lintas yang baik.

3. Program dari pusat dan propinsi

Program dari kementerian Perhubungan maupun dari Dinas Perhubungan Propinsi membantu daerah (Kab/kota) dalam menyediakan perlengkapan transportasi.

4. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, efisien dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan, efisiensi dan keamanan dalam berlalu lintas.

5. Moda transportasi online

Meningkatnya moda transportasi online memberikan kemudahan, efektifitas dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung perwujudan sistem transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

6. Pengembangan jaringan baru.

Pengembangan jaringan baru memberikan kemudahan keterjangkauan masyarakat terhadap sarana prasarana perhubungan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat.

7. Pengembangan RT RW. RTBL

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi bahwa penataan ruang Kota Cimahi adalah mengembangkan ruang kota yang mengarah pada kota jasa. Guna mendukung perkembangan Kota Cimahi sebagai kota yang berbasis jasa, tentunya perlu didukung dengan sarana prasarana transportasi yang memadai dan tetap menjaga serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

8. Pengembangan LRT, CLRT/BLRT

Pengembangan LRT, CLRT/BLRT merupakan sistem yang memprioritaskan angkutan umum sebagai alat transportasi utama yang terintegrasi dan terkoneksi, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjangkau pelayanan transportasi dan sistem ini dapat menekan angka jumlah kendaraan pribadi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Kondisi umum sistem jaringan jalan Kota Cimahi, menunjukkan bahwa sistem jaringan jalan kota utama berfungsi menghubungkan pusat Kota Cimahi dengan Kota Bandung di bagian utara, Kabupaten Bandung di bagian selatan dan Kab. Bandung Barat di bagian barat.

Ruas jalan utama yang menghubungkan pusat Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung antara lain adalah Jalan Tol (padaleunyi dan seroja), Jalan Cimindi dan Jalan Cibeureum. Sedangkan ruas jalan utama yang menghubungkan pusat Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung antara lain adalah Jalan Daeng Ardiwinata, Jalan Kolonel Masturi, Jalan Jend Amir machmud dan Jalan Nanjung.

Seiring dengan terbentuknya Kota Cimahi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116), sebagai daerah otonom memberikan peluang terhadap peningkatan pelayanan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah otonom yaitu Pelayanan Transportasi.

Infrastruktur transportasi terdiri dari jalan dan perhubungan. Jaringan jalan di Kota Cimahi terdiri dari jalan tol, jalan Nasional/Provinsi, jalan kota, dan jalan perumahan dan permukiman berupa gang. Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (fish bone), karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke jalan raya cimahi/nasional sebagai jalan utama. Jalan ini harus menampung muara pergerakan menerus. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan beban penggunaan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam sibuk/puncak.

Tabel 10

**Klasifikasi Jalan Di Kota Cimahi
Berdasarkan Fungsi Jalan**

No	Klasifikasi Jalan	Panjang (Km)
1.	Jalan Tol	17
2.	Jalan Nasional	6,95
3.	Jalan Propinsi	8,95

4.	Jalan Kota	127,456
5.	Jalan Perumahan dan Permukiman (Gang)	145,864

Sumber : Dinas Marga Kota Cimahi

Jaringan jalan sebagai salah satu struktur pembentuk kota, memiliki pola - pola jaringan jalan tertentu. Secara umum pola jaringan jalan terdiri dari atas :

1. Linear (pita)
2. Kisi – kisi (grid iron)
3. Jari – jari (radial)
4. Melingkar

Penentuan pola jaringan jalan di Kota Cimahi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1. Jaringan jalan Regional yaitu lalu lintas luar kota dan lalu lintas antar kota melintas atau bertemu pada daerah inti kota.
2. Pusat – pusat aktifitas yang berlokasi pada satu daerah yang sama di sekitar inti kota.
3. Pola penyebaran aktifitas kota.

Berdasarkan bentuk umum dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditentukan pola jaringan jalan di Kota Cimahi, yaitu pola Linear dan Radial.

Problem transportasi di Kota Cimahi bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, serta perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa masalah transportasi di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan
Tingkat pengetahuan yang rendah pengguna jalan dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas.
2. Laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas jalan.
Adanya kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Kota Cimahi kesulitan dalam pembebasan lahan untuk melakukan pelebaran jalan atau menambah ruas jalan yang baru.
3. Terbatasnya prasarana transportasi (lahan terminal, lahan parkir, serta kuantitas dan kualitas jalan).
Keterbatasan lahan dan harga lahan yang tinggi, menjadi kendala dalam pengadaan lahan terminal maupun parkir.

4. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang menimbulkan kemacetan.
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota membutuhkan peningkatan pelayanan transportasi.
5. Kemacetan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan nasional dan provinsi pada jam tertentu karena pola jaringan jalan di Kota Cimahi memiliki jaringan jalan yang memusat ke jalan nasional sebagai jalan utama, maka jalan ini harus menampung muara pergerakan menerus dan kemacetan ini juga dikarenakan Kota Cimahi merupakan kota lintasan, yaitu adanya kecenderungan pergerakan kendaraan menuju kota Bandung, kab Bandung dan Kab Bandung Barat ataupun sebaliknya untuk bekerja/usaha atau sekolah, sehingga kemacetan ini mengakibatkan juga pada jalan lokal/arteri di Kota Cimahi.
6. Keterbatasan ASN yang memiliki kompetensi di bidang transportasi.
ASN yang mempunyai kualifikasi di bidang transportasi masih terbatas.
7. Adanya parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, karena keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).
8. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi
Banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi karena angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman, tidak efisien dan efektif.
9. Belum terpadunya kewenangan pengelolaan sarana dan prasarana jalan terutama yang berada di jalan nasional dan provinsi.
10. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Semakin meningkatnya moda transportasi online.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra Strategis Dinas Perhubungan tahun 2012 – 2017 mengalami perubahan sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi tata kelola (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Adapun Visi Walikota terpilih adalah sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Maju, yang berarti Kota Cimahi harus terus maju kedepan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan;

Agamis, yang berarti bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Berbudaya, diartikan sebagai di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki keperibadian dalam kebudayaan.

Dengan terpilihnya walikota baru tahun 2017- 2022, maka Dinas Perhubungan harus menyesuaikan dengan visi misi tersebut, maka Visi walikota terpilih dijadikan pijakan untuk melangkah menuju harapan yang ingin dicapai bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi, masalah dan aspirasi masyarakat Kota Cimahi, maka Visi Kota Cimahi 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA TRANSFORTASI YANG ANDAL “ .

Penetapan visi ini didasarkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib, lancar, berkeselamatan kepada masyarakat.

ANDAL, yaitu dapat menjamin bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan transfortasinya dapat memberikan rasa aman, nyaman, lancar, berkeselamatan berdasarkan prinsip :

- Berkeadilan
- Keterjangkauan
- Berwawasan lingkungan

Keterkaitan antara visi Walikota dan Visi Dinas Perhubungan yaitu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan akan meningkatkan pelayanan transfortasi kepada masyarakat yang memberikan rasa aman, nyaman, kelancaran dan kemudahan aksesibilitas pelayanan angkutan.

MISI

Guna mewujudkan visi, maka misi kota Cimahi 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeperibadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;

Sejalan Misi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Angkutan Umum.
 - Tujuan :
Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan berkeselamatan
 - Sasaran :
Meningkatkan akseibilitas pelayanan transportasi
- b. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas.
 - Tujuan :
Terselenggaranya lalu lintas yang tertib dan lancar
 - Sasaran :
Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Keterkaitan antara misi Walikota terpilih periode 2017 – 2022 dan misi Dinas Perhubungan, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan mengacu kepada *misi ke 4, yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan* dan skala prioritas program kerja pembangunan walikota Tahun 2017 - 2022 yaitu *mengurangi*

kemacetan. Sehingga untuk 5 (lima) tahun ke depan, pelayanan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih, fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar dapat memberikan rasa aman, nyaman, lancar, berkeselamatan berdasarkan prinsip berkeadilan, keterjangkauan dan berwawasan lingkungan.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Cimahi diantaranya :

- Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum.
- Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
- Tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang masih tinggi.
- Terbatasnya sarana prasarana lalu lintas baik kuantitas maupun kualitas.
- Terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan perhubungan.
- Terbatasnya kewenangan pengelolaan sarana prasarana lalu lintas di jalan nasional maupun propinsi.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah, yaitu :

- Adanya regulasi transportasi
- Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat
- Penguatan fungsi dengan stake holder, masyarakat, dunia pendidikan dan badan usaha (Koperasi).
- Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan konvensional .

- Adanya koordinasi tentang masalah transportasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi maupun Dinas Perhubungan Kab/Kota terdekat.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional.
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undangundangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementrian Perhubungan, ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, yaitu :

1. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana lalu lintas.
3. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan.
4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis IT

Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat mempunyai tujuan yaitu :

1. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang mampu mendukung pelayanan transportasi yang efisien.
2. Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang efisien

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan yang efisien
2. Meningkatnya prasarana dan fasilitas LLAJ melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan propinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, ada beberapa point yang selaras dengan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, yaitu

1. Peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan Kota Cimahi
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lalu lintas.
3. Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera Kota Cimahi dalam rencana jaringan pergerakan, antara lain :

- a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
 - Pengembangan Jalan Nasional dan Jalan Propinsi
 - Pengembangan jalan lingkar utara
 - Pengembangan jalan lingkar selatan
 - Pengembangan sekunder
- b. Rencana Pengembangan Terminal

Saat ini Kota Cimahi belum memiliki terminal tipe B untuk melayani angkutan umum antara kota, baik antar kota antar propinsi maupun antar kota di dalam propinsi, sedangkan pengembangan terminal antara lain :

- Pengembangan terminal di Pasar Atas
 - Pengembangan Terminal di Cibeber
 - Pengembangan Terminal di Pasar Antri
 - Pengembangan Terminal di Cimindi
5. Rencana Pengembangan Under Pass
Rencana pengembangan under pass di jalan Gatot Subroto dan Jalan Sriwijaya.
6. Rencana Jaringan Jalur Kereta Api
Peningkatan dan pengembangan jalur berbasis rel, pembangunan kereta api cepat, pembangunan stasiun terpadu dengan mengembangkan integrasi antar moda .
7. Rencana Pengembangan angkutan massal.
Rencana pengembangan jaringan angkutan massal berbasis rel dan cable car.
8. Rencana Pembangunan Jalan Layang
Rencana pengembangan jalan layang kebon sari-HMS Mintaredja, Padasuka-Warung Contong, Pasir kumeli- PuskidPom dan Abdul Halim-Cigugur.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Kota Cimahi, maka point yang berkaitan dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017 - 2022, yaitu :

1. Program sarana dan prasarana lalu lintas melalui penyediaan rambu, marka, speed bamber, pagar , CCTV, ATCS, penyusunan kajian, traffic counting.
2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, melalui peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor online dengan teknologi tinggi.
3. Program pelayanan angkutan melalui pembangunan terminal, shelter, penambahan rute, dan pengembangan angkutan.

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Tingkat kemacetan yang masih tinggi dan perlu penanganan secara intens
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi

- Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang kurang memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
- Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.
- Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang yang berbasis IT disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang berteknologi tinggi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka isu strategis yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan perlu penanganan segera dan intens yaitu ***masalah kemacetan***, dimana kemacetan di Kota Cimahi sangat tinggi pada jam tertentu dan ruas jalan tertentu (Jalan nasional) yang mengakibatkan kemacetan ke jalan lokal. Masalah kemacetan bisa mengakibatkan waktu tempuh menjadi lama, kesemerawutan bahkan mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan isu strategis, permasalahan perhubungan di Kota Cimahi yaitu masih **tingginya tingkat kemacetan**, maka tujuan yang akan dicapai Kota Cimahi adalah ***meningkatkan kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan***, sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah ***meningkatkan kelancaran lalu lintas***. Adapun tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Meningkatkan Sistem jaringan transportasi jalan yang efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penataan rute yang ada maupun pembukaan rute baru.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi, seperti rambu, marka, penerangan jalan umum, halte, bis sekolah, dll.
- c. Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT dan meningkatkan peralatan pengujian yang berteknologi tinggi
- d. Meningkatkan disiplin masyarakat dalam rangka menciptakan lalu-lintas yang tertib dan teratur melalui sosialisasi ataupun penegakan hukum.
- e. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan/diklat fungsional

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang efektif. Berdasarkan isu strategis, Sasaran yang ingin dicapai Kota Cimahi adalah ***tingkat pelayanan jalan (LOS)***, sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi ***Meningkatkan kelancaran lalu lintas***. Adapun sasaran 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kelancaran lalu lintas

Kelancaran lalu lintas harus didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang transportasi baik kuantitas maupun kualitas, titik kemacetan maupun simpul kemacetan bisa diatasi, peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT dengan penggunaan peralatan pengujian yang berteknologi tinggi, dan pelaksanaan sosialisasi maupun penegakan hukum.

b. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi

Pelayanan transportasi bisa menjangkau seluruh kawasan baik jalan kolektor maupun jalan alteri dan masyarakat bisa menjangkau angkutan umum dengan mudah, melalui penataan rute yang ada dan pembukaan rute baru dengan memaksimalkan angkutan yang ada dengan peningkatan sarana prasana penunjang fasilitas angkutan, seperti pembangunan terminal maupun shelter.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel 11

Tabel 11
TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kelancaran lalu lintas	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Tingkat Kelancaran Lalu lintas (VcR)	D	D	D	D	C

Tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022 disajikan dalam tabel 14 sebagaimana di dalam lampiran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIKAN

5.1. Strategi

Strategi yaitu keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam menentukan strategi, salah satu teori pemilihan strategi yang “tepat” untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan internal organisasi dan kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut analisis SWOT. Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi juga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan (streight) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Matriks SWOT
- b. Mengelompokkan variabel berdasarkan pernyataan-pernyataan terpilih
- c. Merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta dengan meminimalkan kelemahan dan dan ancaman.

Tabel 12
Rumusan Analisis SWOT

O(Kesempatan)	T (Ancaman)
1. Regulasi Trasfortasi	1. Disiplin Penggna Jalan
2. Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain	2. Kewenangan pengelolaan prasarana jalan
3. Komitmen Kepala Daerah	3. Jaringan jalan terbatas
4. Peran serta swasta dan masyarakat	4. Keterbatasan lahan parkir

S (Kekuatan)	1. Jumlah SDM 2. Sarana Prasarana Kantor 3. Sarana Prasarana penunjang jalan 4. Teknologi (IT)	1. Kebijakan pemerintah tentang subsidi angkutan umum 2. Pengembangan teknologi dan informasi di bidang transportasi 3. Peningkatan sarana prasarana penunjang jalan	1. Pelaksanaan traffic demand management 2. Penegakan hukum terkait pelanggaran lalin yang konsisten
W (Kelemahan)	1. Keterbatasan alokasi anggaran 2. Keterbatasan SDM yang berkompetensi khusus 3. Dukungan Master Plan Perhubungan	1. keterlibatan masyarakat dalam pelayanan transportasi 2. Penyusunan Masterplan	1. Kerjasama pemerintah dan swasta di bidang transportasi 2. Menegakan konsistensi tentang tata guna lahan

Berdasarkan Analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, antara lain :

1. Kebijakan pemerintah tentang subsidi angkutan umum
2. Pengembangan teknologi dan informasi di bidang transportasi
3. Peningkatan sarana prasarana penunjang jalan
4. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan transportasi
5. Penyusunan Masterplan
6. Pelaksanaan Pelaksanaan traffic demand management
7. Penegakan hukum terkait pelanggaran lalin yang konsisten
8. Kerjasama pemerintah dan swasta di bidang transportasi
9. Menegakkan konsistensi tentang tata guna lahan

Maka berdasarkan strategi Analisis SWOT tersebut bisa disimpulkan kembali, supaya lebih efisien dan efektif, strategi yang bisa dilakukan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan).
2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan
3. Meningkatkan pelayanan angkutan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan visi misi maupun sasaran strategis serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, maka sebagai pedoman/petunjuk Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
2. Peningkatan sarana prasarana perparkiran
3. Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Peningkatan kualitas Alat Uji.
5. Rekayasa Lalu Lintas.
6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengamanan Lalu Lintas.
7. Meningkatkan Angkutan Penumpang dan Barang

Adapun tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, disajikan dalam tabel 11

Tabel 13
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan kelancaran lalu lintas	2. Meningkatnya kelancaran lalu lintas	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan). 2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan 3. Meningkatkan pelayanan angkutan	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 2. Peningkatan sarana prasarana perparkiran 3. Pengujian Kendaraan Bermotor. 4. Peningkatan kualitas Alat Uji. 5. Rekayasa Lalu Lintas. 6. Peningkatan Koordinasi dan

			Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas. 7. Meningkatkan Angkutan Penumpang dan Barang
--	--	--	---

Arah Kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, dimana diantara kebijakan tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Dinas Perhubungan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran strategis, maka Dinas Perhubungan Kota Cimahi didukung oleh beberapa program yang termuat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Permendagri 21 Tahun 2011. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebelumnya berjumlah 10 program, namun sejalan dengan visi misi walikota terpilih dan untuk meningkatkan efektifitas dan efesien sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi, maka jumlah program wajib menjadi 3 buah dan program penunjang menjadi 3 program di sekretariat untuk memfasilitasi kebutuhan aparatur. Adapun programnya, yaitu :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini menyediakan sarana prasarana Lalu Lintas bertujuan untuk menunjang meningkatnya kelancaran lalu lintas, terdiri dari 6 kegiatan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi peralatan pengujian kendaraan bermotor maupun gedung Pengujian Kendaraan Bermotor., terdiri dari 3 kegiatan.
3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan cara mengendalikan keselamatan dan pengamanan lalu lintas, terdiri dari 7 kegiatan.
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini menyediakan sarana prasarana angkutan dan menunjang meningkatnya kelancaran lalu lintas, terdiri dari 9 kegiatan
5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas angkutan, terdiri dari 2 kegiatan.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program bertujuan untuk menunjang/memfasilitasi kebutuhan aparatur, terdiri dari 12 kegiatan.
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan.

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Aparatur, terdiri dari 3 kegiatan.
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, terdiri dari 2 kegiatan.
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk menyajikan laporan kinerja maupun keuangan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan-kegiatan yang telah dilaksanakan, terdiri dari 5 kegiatan.

6.2. Kegiatan Dinas Perhubungan

Di dalam melaksanakan kegiatan, seluruh unit kerja bidang pada Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini.

Kegiatan merupakan rangkaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan untuk dapat diimplementasikan, adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan ini berupa pelaksanaan traffic counting dan kajian amdalalin
2. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas
Kegiatan ini berupa penyediaan rambu-rambu lalu lintas
3. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Kegiatan ini berupa penyediaan marka jalan
4. Kegiatan ini Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Kegiatan penyediaan pagar pengaman jalan
5. Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum
Kegiatan ini berupa pengadaan penerangan jalan umum, PJG,PJL
6. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Kegiatan ini berupa pemeliharaan terhadap PJU, PJG, dan PJL.
7. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan prosedur bidang perhubungan

- Kegiatan ini berupa penyusunan kajian dan Perwal
8. Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Perparkiran
Kegiatan ini berupa penyediaan sarana prasarana perparkiran
 9. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini berupa pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor
 10. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana/Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini berupa pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor
 11. Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir/Juru Mudi untuk Meningkatkan Keselamatan Penumpang
Kegiatan ini berupa pemeriksaan kesehatan bagi supir.
 12. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang
Kegiatan ini berupa pengujian terhadap kendaraan bermotor
 13. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Kegiatan ini berupa penegakan hukum terhadap angkutan umum
 14. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada siswa/guru, cerdas cermat tingkat siswa/guru, Safety Ridding, pemilihan siswa pelopor keselamatan.
 15. Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas
Kegiatan ini berupa pelaksanaan rekayasa lalu lintas
 16. Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kendaraan
Kegiatan ini berupa pengadaan alat uji kendaraan
 17. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan alat pemantau kemacetan
Kegiatan berupa pengadaan/pemeliharaan CCTV, pengadaan drone, pengadaan pusat informasi , pengadaan ITS.
 18. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengujian di luar gedung pengujian
 19. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Kegiatan ini berupa pemeliharaan terminal
 20. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan terminal
Kegiatan berupa sewa terminal Pasar Antri, pengelolaan terminal cimindi dan Pasar Atas .

21. Kegiatan Pengembangan Sarana & Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Kegiatan ini berupa pengawasan terhadap angkutan karyawan perusahaan dan mudik gratis
22. Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan ini berupa forum LLAJ dan lomba tata tertib lalu
23. Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
Kegiatan ini berupa pembangunan gedung terminal tipe c
24. Kegiatan Pembangunan Halte bus/taxi, Shelter Gedung Terminal
Kegiatan ini berupa pembangunan shelter
25. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan
Kegiatan berupa pengumpul data angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek dan angkutan barang.
26. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Angkutan Umum Teladan
Kegiatan ini berupa pemilihan sopir/juru mudi teladan
27. Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.
Kegiatan ini berupa pengawasan terhadap angkutan karyawan perusahaan
28. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan jasa komunikasi dan listrik.
29. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan perlindungan terhadap kendaraan operasional kantor melalui asuransi kendaraan.
30. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Kegiatan ini menyediakan pencapaian kegiatan Dinas Perhubungan berupa laporan keuangan triulan dan semesteran.
31. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini memfasilitasi penyediaan jasa dan peralatan kebersihan.
32. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan ini menyediakan perbaikan peralatan kerja dalam rangka menunjang kegiatan aparatur.
33. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan peralatan kantor dan alat tulis kantor.

34. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan foto copy, penggandaan dan pencetakan kantor dan kancis retribusi untuk PAD.
35. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan peralatan listrik
36. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan buku dan koran
37. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan bahan logistik kantor
38. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan makan minum rapat dan kantor
39. Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan melaksanakan koordinasi dan konsultasi
40. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan kendaraan operasional kantor
41. Keadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan gedung kantor.
42. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor
43. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini berupa memfasilitasi kebutuhan BBM kendaraan operasional
44. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan pakaian dinas aparatur
45. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan pakaian lapangan aparatur
46. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu
Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan pakaian batik
47. Kegiatan Pembinaan Pegawai
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap THL
48. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui diklat/pelatihan

49. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini merupakan laporan pencapaian pelaksanaan kegiatan baik laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPI, LPPD
50. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Ssemesteran.
Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan dinas semesteran
51. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan ini merupakan laporan pencapaian realisasi kegiatan semesteran
52. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan akhir tahun
53. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “Kerangka Regulasi” maupun dalam “Kerangka Anggaran”, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu lembaga maupun antar lembaga, dengan tetap memperhatikan peran, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan, dimana kerangka pendanaan transportasi Dinas Perhubungan disusun berdasarkan kebutuhan capaian kinerja.

Pendanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi, tetapi untuk tahun selanjutnya bisa mendapat bantuan dari provinsi (bangub) maupun pusat (dana alokasi khusus/kementrian).

Program, kegiatan dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 15 sebagaimana di dalam lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam meningkatkan terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pelayanan transportasi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan indikator kinerja utama sesuai visi misi Pemerintah Kota Cimahi dan Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan visi misi tahun 2017 - 2022, Dinas Perhubungan mengacu kepada misi yang keempat, yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Berdasarkan visi misi tersebut, maka tujuan dinas Perhubungan adalah meningkatkan kelancaran lalu lintas, dengan sasaran meningkatnya kelancaran lalu lintas .

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi dalam bidang perhubungan, yaitu Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS), sedangkan **Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yaitu Tingkat Kelancaran Jalan/Rasio Volume Kapasitas (VcR).**

7.2. Indikator

Indikator adalah variabel yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis, maka variabel untuk mengukur tingkat kelancaran lalu lintas adalah Rasio Volume Kapasitas (VcR). Sedangkan indikator program yang digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran lalu lintas adalah :

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah persentase fasilitas lalu lintas yang layak.
2. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas adalah persentase titik kemacetan dan persentase angkutan laik jalan.
3. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Angkutan adalah persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum dan persentase tersedianya halte dan terminal.

Berdasarkan indikator program, maka variabel yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah data base volume kendaraan/pelaksanaan traffic counting dan dokumen amdalalin.

b. Maksud

Maksud dari kegiatan “Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan” adalah untuk Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menaikan kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada satu jalan, melakukan optimalisasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan dan kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut harus di kontrol.

c. Tujuan

Tujuan dari kegiatan “Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan” adalah tersedianya data base volume kendaraan arus mudik

lebaran dan mendapatkan tingkat efesiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan dengan sarana penunjang yang tersedia.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Pembahasan Analisa Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cimahi merupakan salah satu persyaratan dari suatu badan atau perseorangan yang akan mendirikan suatu bangunan yang diperkirakan akan mengakibatkan menimbulkan dampak terhadap aktifitas lalu lintas dan angkutan.
- Kegiatan Pembahasan Analisa Dampak Lalu Lintas ini melibatkan beberapa unsur diantaranya adalah dari Unsur Dinas Perhubungan, Unsur Polri, Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, serta perusahaan atau perseorangan yang mengajukan pembahasan Analisa Dampak Lalu Lintas.
- Traffic Counting Lebaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi serta menganalisis perkembangan jumlah kendaraan yang melintasi jalur mudik, menganalisis bangkitan dan tarikan pergerakan kendaraan, menganalisis kinerja persimpangan, menganalisis pengaruh perkembangan pertumbuhan kendaraan guna lahan di sepanjang persimpangan jalan yang dilintasi para pengguna kendaran.
- Traffic Counting 10 Ruas jalan Kota bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan guna lahan di sepanjang koridor jalan tersebut, menganalisis bangkitan dan tarikan pergerakan, menganalisis kinerja ruas jalan, menganalisis pengaruh perkembangan guna lahan di sepanjang koridor jalan tersebut terhadap kinerja ruas jalan.

e. Target kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah :

- Terlayannya masyarakat yang mengajukan permohonan Analisa Dampak Lalu Lintas di wilayah Kota Cimahi
- Tersedianya data lalu lintas di 10 ruas jalan Kota Cimahi
- Tersedianya data lalu lintas arus mudik dan balik lebaran

- f. Output Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah :
- Terlayannya masyarakat pemohon analisa dampak lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi
 - Terdapatnya data kepadatan lalu lintas di 10 ruas jalan di Kota Cimahi
 - Terdapatnya data jumlah kendaraan yang melintasi di 10 ruas jalan Kota Cimahi
 - Terdapatnya data kepadatan lalu lintas arus mudik dan balik lebaran di Kota Cimahi
 - Terdapatnya data jumlah kendaraan yang melintas pada saat arus mudik dan balik lebaran di Kota Cimahi
 - Terciptanya lalu lintas yang nyaman di wilayah Kota Cimahi
- g. Outcome
- Meningkatnya kelancaran lalu lintas di kota Cimahi

2. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah Perda, Perwal dan Kajian.

b. Maksud

Maksud kegiatan “Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Dan Prosedur Di Bidang Perhubungan” adalah sebagai dasar dan landasan pokok dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan sebagai data primer dalam pelaksanaan program- program kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

c. Tujuan

Tujuan dari kegiatan “Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Dan Prosedur Di Bidang Perhubungan” adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam bidang perhubungan .

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Kegiatan Tahun 2018

- Kajian Rencana Induk Jaringan lalin dan Angkutan
- Uji Publik Penggembokan parkir

Kegiatan Tahun 2019

- Kajian Kebutuhan Halte / shelter Se-kota Cimahi
- Kajian E- Parking di Kota Cimahi
- Perwal tata Cara bongkar Muat Barang di Kota Cimahi
- Perencanaan Intelegen Transportasi System

Kegiatan Tahun 2020

- Kajian layanan transportasi angkutan siswa
- Perwal tentang tata cara pemeriksaan dan penindakan di bidang Perhubungan
- Kajian Tentang kebutuhan terminal Tipe B di Kota Cimahi
- Kajian study kelayakan Pasar Kuda / Citeureup untuk di jadikan terminal Tipe

Kegiatan Tahun 2021

- Kajian Akademis tentang tata cara pemeriksaan dan penindakan di bidang Perhubungan
- Kajian Kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Kota Cimahi
- Perwal tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang di kota cimahi
- Kajian tentang kebutuhan angkutan barang / orang tidak dalam trayek

Kegiatan Tahun 2022

- Kajian tataran transportasi lokal di Kota Cimahi

e. Target kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Dan Prosedur Di Bidang Perhubungan adalah :

- Tersedianya dokumen Kajian Rencana Induk Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi
- Tersusunnya dokumen uji publik penggembokan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi

- Tersedianya dokumen Kajian Kebutuhan Halte / shelter Se-kota Cimahi
 - Tersedianya dokumen Kajian E- Parking di Kota Cimahi
 - Terbentuknya Perwal tata Cara bongkar Muat Barang di Kota Cimahi
 - Tentang Perencanaan Intelegen Transportasi System
 - Tersedianya dokumen Kajian layanan transportasi angkutan siswa
 - Terbentuknya Perwal tentang tata cara pemeriksaan dan penindakan di bidang Perhubungan
 - Tersedianya dokumen Kajian Tentang kebutuhan terminal Tipe B di Kota Cimahi
 - Tersedianya dokumen Kajian study kelayakan Pasar Kuda / Citeureup untuk di jadikan terminal Tipe
 - Tersedianya dokumen Kajian Akademis tentang tata cara pemeriksaan dan penindakan di bidang Perhubungan
 - Tersedianya dokumen Kajian Kebutuhan Penerangan Jalan Umum di Kota Cimahi
 - Terbentuknya Perwal tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang di kota cimahi
 - Tersedianya dokumen Kajian tentang kebutuhan angkutan barang / orang tidak dalam trayek
 - Tersedianya dokumen Kajian tataran transportasi lokal di Kota Cimahi
- f. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Tersusunnya kajian kajian rencana kegiatan Dinas Perhubungan kota cimahi
 - Terencananya program-program kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi
 - Terbentuknya aturan hukum yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kota Cimahi
 - Terciptanya lalu lintas yang nyaman di wilayah Kota Cimahi
- g. Outcome
- Meningkatnya pelayanan di bidang lalu lintas

3. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan sosialisasi.

b. Maksud

Maksud Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan untuk menumbuhkan kesadaran siswa/i Sekolah Dasar (SD) s/d SLTA dalam berlalu lintas di jalan raya yang tertib dan mematuhi aturan yang ada demi keselamatan berlalu lintas di jalan raya serta memberikan pengetahuan terhadap siswa/i SD s/d SLTA dan pengajar mengenai denda terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas sesuai UU lalu lintas No.22 Tahun 2009.

c. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan kegiatan adalah tersebarnya informasi kebijakan di bidang perhubungan, serta meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas dan peningkatan disiplin berlalu lintas.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas untuk tingkat Siswa dan Pengajar
- Kegiatan Safety Ridding untuk pelajar tingkat SLTA di wilayah Kota Cimahi
- Kegiatan Cerdas Cermat tingkat SLTA di wilayah Kota Cimahi
- Pemilihan Pelajar Pelopor Tingkat Kota Cimahi, tingkat Provinsi dan tingkat nasional

e. Target kegiatan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan adalah :

- Penyuluhan terhadap Anak Sekolah Dasar, SLTP dan Siswa / I SLTA serta Pengajar di wilayah Kota Cimahi
- Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA
- Pelaksanaan safety riding terhadap pelajar SLTA.
- Pemilihan Pelopor Tingkat Kota Cimahi, tingkat Provinsi dan tingkat nasional

h. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya penyuluhan terhadap Anak Sekolah Dasar, SLTP dan Siswa / I SLTA serta Pengajar di wilayah Kota Cimahi
- Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA

- Terlaksananya safety riding terhadap pelajar SLTA.
 - Terpilihnya Pelopor Tingkat Kota Cimahi, tingkat Provinsi dan tingkat nasional
- h. Outcome
- Meningkatnya pengetahuan tentang berlalu lintas dan tertib berlalu lintas

4. Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Angkutan

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan forum LLAJ.

b. Maksud kegiatan “Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah untuk Terciptanya tertib lalu lintas di Kota Cimahi, serta peningkatan wawasan dalam rangka lomba Wahana Tata Nugraha

c. Tujuan

Tujuan kegiatan “Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah meningkatkan tertib berlalu lintas

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Lomba Tertib Lalu Lintas Tingkat Nasional
- Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

e. Target kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah :

- Tersedianya dokumen Lomba Tertib lalu lintas yang berisikan data base tentang transportasi yang ada di Kota Cimahi
- Diperolehnya penghargaan dalam ajang perlombaan Wahana Tata Nugraha.
- Terbentuknya Forum LLAJ sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan masalah transportasi demi terciptanya transportasi yang aman, selamat, nyaman dan tertib.

f. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Dokumen Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN)
- Buku profil Forum LLAJ
- Diperolehnya penghargaan dalam ajang lomba Wahana Tata Nugraha.

g. Outcome

Meningkatnya tertib berlalu lintas

5. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kemacetan

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah CCTV, sistem jaringan Control, Pusat kendali dan informasi.

b. Maksud

Maksud dari kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kemacetan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas

c. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kemacetan adalah terciptanya tertib lalu lintas di Kota Cimahi dan peningkatan kualitas alat pendukung kemacetan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Pengadaan System Jaringan Control Lalin
- Pengadaan Alat Pemantau CCTV
- Tenaga Pendukung Pusat Kendali dan Informasi
- Pengadaan Drone dan alat pendukung
- Pengadaan Intelegen Transportasi System (ITS)
- Pengadaan Mobile CCTV
- Pengadaan UPS dan peralatan pendukung

e. Target kegiatan “ Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kemacetan adalah :

- Tersedianya kamera pemantau (CCTV) di terminal-terminal yang berada di wilayah Kota Cimahi
- Terpeliharanya kamera pemantau (CCTV) di sejumlah ruas jalan yang berada di wilayah Kota Cimahi
- Terpasangnya sistem jaringan kontrol lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi

- Terpeliharanya ruang kendali (Control Room) pemantau lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Cimahi
 - Tenaga Pendukung Pusat Kendali dan Informasi
 - Tersedianya Drone dan alat pendukungnya pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi
 - Terpasangnya Intelegen Transportasi System (ITS) di ruas jalan di kota cimahi
 - Tersedianya Mobile CCTV
 - Tersedianya UPS dan peralatan pendukung
- f. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Terpantaunya tingkat kemacetan ruas ruas jalan yang berada di wilayah kota cimahi
 - Terpantaunya tingkat kemacetan dan aktifitas di terminal - terminal yang berada di wilayah kota cimahi
 - Maksimalnya ruang kendali pemantau lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Cimahi
- g. Outcome
- Meningkatnya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas

6. Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan pengadaan rambu lalu lintas adalah jumlah terpasangnya rambu lalu lintas.

b. Maksud

Maksud dari kegiatan Pengadaan Rambu Jalan yaitu meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan kegiatan Peadaan Rambu Jalan adalah :

- Meningkatkan keselamatan dan kelancaran bagi para pengguna kendaraan bermotor dan pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Cimahi;
- Mendukung serta meningkatkan peran serta kinerja Pemerintah dalam mengurangi jumlah kematian dan kerugian materi yang disebabkan oleh kecelakaan.
- Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perekonomian melalui penataan sistem transportasi yang lebih handal.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Memberikan keamanan, nyaman dan ketertiban bagi para pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Cimahi;

- Mendukung fasilitas lalu lintas lainnya dengan kegiatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas tahun 2018 di Kota Cimahi;
 - Mendukung program Pemerintah Pusat secara sinergis, khususnya di sektor transportasi.
- e. Target
- Target Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 – 2022, adalah sebagai berikut :
- Pemasangan Rambu Uk. 75Cm x75Cm sebanyak 125 Buah
 - Pemasangan RPPJ Uk. 120Cm x 240Cm sebanyak 10 Buah;
 - Pemasangan Warning Light Solar Cell sebanyak 3 Buah;
 - Pemasangan Rambu Elektronik sebanyak 1 Buah;
 - Pemasangan Cermin Tikung sebanyak 25 Buah;
 - Pemasangan Rambu Tiang F Double Daun ukuran 75 cm x 75 cm sebanyak 10 Buah.
 - Pemeliharaan Rambu – Rambu lalu Lintas 1 paket
- f. Output dalam kegiatan pengadaan rambu – rambu lalu lintas ini adalah terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (Rambu-rambu Lalu Lintas)
- g. Outcomenya adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

7. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah terpasangnya marka jalan.

b. Maksud

Maksud dari kegiatan Pengadaan Marka Jalan adalah meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat

c. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pengadaan Marka Jalan adalah :

- Menciptakan rasa nyaman dan aman kepada pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna jalan kaki sehingga meningkatkan keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas.
- Mendukung peran fasilitas lalu lintas lainnya sehingga kinerja fasilitas lalu lintas dan informasi yang disampaikan dapat berjalan lebih optimal.
- Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perekonomian melalui penataan sistem transportasi yang lebih handal.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pengadaan dan pemasangan marka jalan yang tersedia di anggaran Tahun 2018.
 - Mendukung program Pemerintah Pusat secara sinergis, khususnya di sektor transportasi.
- e. Target
- Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018 - 2022 sebagai berikut :
- Pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 1510 M² di Kecamatan Cimahi Tengah
 - Pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 1730 M² di Kecamatan Cimahi Selatan
 - Pengadaan dan pemasangan marka jalan sebanyak 1560 M² di Kecamatan Cimahi Utara
 - Pengadaan dan pemasangan marka ZOSS di 6 lokasi
 - Pengadaan dan pemasangan marka kuning sebanyak 550 M²
 - Pengadaan dan pemasangan paku marka jalan tipe kaca bundar 500 buah
 - Pengadaan dan pemasangan speed bumper 243 buah
- f. Output
- Output dalam kegiatan pengadaan marka jalan ini adalah terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan). Sedangkan outcomenya adalah Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.
- g. Outcome
- Outcomenya adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

8. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

- a. Indikator dari kegiatan ini adalah.
- Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan terpasangnya pagar pengaman jalan
- b. Maksud
- Maksud dari kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan adalah meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat
- c. Tujuan
- Tujuan dari kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan adalah sebagai berikut :
- Menciptakan rasa nyaman dan aman kepada pengguna kendaraan bermotor maupun masyarakat di sekitar rencana pemasangan pagar pengaman jalan, khususnya pada musim hujan yang menyebabkan banjir;
 - Membantu dan meningkatkan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas;

- Mendukung peran ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan sehingga kinerja lalu lintas dapat berjalan lebih nyaman dan aman.
- Melaksanakan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan yang tersedia di anggaran Tahun 2018;
- Mendukung peran kinerja ruas-ruas jalan yang dibutuhkan di Kota Cimahi.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Terpasangnya pagar pengaman jalan sebanyak 189 M di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah.
- Terlayannya keamanan dan kenyamanan ruas-ruas Jalan yang rawan di Kota Cimahi

e. Target

Terpasangnya pagar pengaman jalan di wilayah Kota Cimahi

- f. Output dalam kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan ini adalah terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (pagar pengaman jalan).
- g. Outcomenya adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

9. Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

b. Maksud

Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas memiliki maksud sebagai berikut :

- Menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban bagi para pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Cimahi;
- Mendukung fasilitas lalu lintas lainnya dengan kegiatan rekayasa lalu lintas tahun 2018 di Kota Cimahi;
- Mendukung program Pemerintah Pusat secara sinergis, khususnya di sektor transportasi.

c. Tujuan

Tujuan Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas sebagai berikut :

- Meningkatkan keselamatan dan kelancaran bagi para pengguna kendaraan bermotor dan pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Cimahi;

- Mendukung serta meningkatkan peran serta kinerja Pemerintah dalam mengurangi jumlah kematian dan kerugian materi yang disebabkan oleh kecelakaan.
- Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perekonomian melalui penataan sistem transportasi yang lebih handal.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rekayasa pada hari-hari tertentu dan ruas-ruas jalan tertentu

e. Target

Target yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Idul Fitri;
- Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Idul Adha;
- Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Malam Tahun Baru;
- Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pemilu Pilkada Propinsi Tahun 2018;
- Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Reguler;
- Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Insidentil.

f. Output dalam kegiatan Rekayasa Lalu Lintas ini adalah terpantaunya dan terkendalinya arus

g. Outcomenya adalah mengoptimalkan ruas jalan dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas.

10. Kegiatan Sarana Prasarana Penunjang Perparkiran

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah sarana prasarana perparkiran.

b. Maksud

Maksud dari Kegiatan Sarana Prasarana Penunjang Perparkiran adalah meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Sarana Prasarana Penunjang Perparkiran adalah meningkatkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kemacetan.

d. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Sarana Prasarana Penunjang Perparkiran adalah titik parkir di wilayah Kota Cimahi

e. Target

Target yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengadaan rambu papan tarif parkir.
- Pemeliharaan marka parkir
- Pemeliharaan Rambu papan tairf parkir
- Penegakan ketertiban parkir
- Monitoring parkir
- Insidentil parkir
- Sosialisasi Juru parkir

f. Output yang akan dihasilkan adalah tersedianya sarana prasarana perparkiran

g. Outcomenya adalah ketertiban lalu lintas, tertatanya area perparkiran dan meningkatnya kelancaran lalu lintas.

11. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Penyediaan prasarana balai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga akses layanan yang dibutuhkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan mudah. Sebagai sarana bidang perhubungan, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan simpul transportasi yang keberadaannya memberikan andil dalam meningkatkan peran serta bidang perhubungan khususnya dalam memproteksi.

Keberadaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) harus dilihat secara holistik artinya kelengkapan sarana / peralatan uji mekanik di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari tersedianya prasarana / balai /balai pengujian.

Untuk menjaga agar fungsi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berjalan dengan baik, perlu ada perhatian dalam hal pemeliharaan / perawatannya, baik sarana maupun prasarananya, sebagai unit pelayanan masyarakat (public service), Unit PKB mampu memberikan kepuasan yang optimal, manakala seluruh komponen dapat dipelihara / dirawat dengan baik, sehingga tersedia Unit PKB yang refresentatif dalam

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang pengujian kendaraan bermotor.

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Maksud

Maksud dari kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor untuk memelihara Balai Pengujian Bermotor sehingga dapat berfungsi dalam meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

d. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berupa bangunan pengujian yang terbentuk dalam satu sistem instalasi pemeriksaan teknik kendaraan atau biasa disebut Jalur Uji, sedangkan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dalam arti luas merupakan keseluruhan bagian dari komponen-komponen parcial yang melekat di dalamnya.

e. Target

Target yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018 – 2022 adalah pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan memperhatikan perkembangan teknologi

f. Output

Output dari kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah terlaksananya pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

g. Outcomenya adalah berfungsinya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan.

12. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam layaknya pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan nilai validitas atau akurasi pemeriksaan diperlukan peralatan penunjang yang biasa disebut dengan Peralatan Uji Mekanik Kendaraan Bermotor (Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor).

Peralatan ini disamping memberikan nilai validitas, juga memberikan aspek kepercayaan bagi pengguna jasa, bahwa kendaraan yang diujikan benar-benar memiliki ukuran kelaikan yang disyaratkan. Sedangkan persyaratan teknik pemeriksaan kendaraan dalam proses pengujian kendaraan bermotor telah diatur berdasarkan peraturan perundangan.

Kota Cimahi secara bertahap telah melengkapi peralatan uji untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan, dengan jumlah kendaraan diatas 4.000 unit, maka Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi sudah termasuk pada katagori Unit Pengujian Statis Lengkap dengan persyaratan minimal harus memiliki 9 (sembilan) alat uji.

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Maksud

Maksud dari Kegiatan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor agar alat uji memiliki umur ekonominya lama serta akurasi pengukurannya tepat berdasarkan kalibrasi alat.

c. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor demi keselamatan kendaraan bermotor.

d. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor adalah meningkatkan keselamatan bermotor.

e. Target

Target Kegiatan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pemeliharaan Peralatan alat uji kendaraan bermotor.

f. Output

Terlaksanakannya pemeliharaan Peralatan alat uji kendaraan bermotor

g. Outcomenya adalah meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor

13.Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang.

Salah satu bentuk pelayanan yang diselenggarakan pemerintah adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Adapun tujuannya adalah untuk memproteksi keselamatan lalulintas terhadap sarana kendaraan bermotor, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang (sering disebut dengan kendaraan wajib uji), sehingga kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Cimahi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan standar pelayanan yang akuntabel, transparan, mudah dan murah. Indikasi dari pelayanan umum yang baik, tentunya harus memiliki sistem pelayanan yang dapat di akses oleh masyarakat, melalui informasi-informasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak merasakan sulit untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Disamping itu penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan regulasi pelayanan umum (public service) yang berlaku secara nasional. Fungsinya untuk memproteksi terhadap validitas kendaraan bermotor (angkutan umum) melalui pengawasan dan pembinaan baik yang diselenggarakan perseorangan maupun badan hukum.

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini jumlah kendaraan wajib uji

b. Maksud

Maksud dari Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang agar meningkatkan pelayanan kendaraan bermotor.

c. Tujuan

Tujuan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang untuk meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor.

d. Sasaran

Pelayanan berkala terhadap kendaraan wajib uji, baik kendaraan penumpang maupun barang.

e. Target

Target Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang adalah Kendaraan bermotor orang maupun barang.

f. Output

Terdatanya jumlah kendaraan laik jalan

g. Outcomenya adalah meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor

14.Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

Persyaratan teknik pemeriksaan kendaraan dalam proses pengujian kendaraan bermotor telah diatur berdasarkan peraturan perundangan. Jenis peralatan uji yang harus dimiliki tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi secara bertahap telah melengkapi sebagian peralatan uji untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan tersebut. Dengan jumlah kendaraan diatas 4.000 unit, maka Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Cimahi sudah termasuk pada katagori Unit Pengujian Statis Lengkap, dengan persyaratan minimal harus memiliki 9 (sembilan) alat uji.

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini jumlah jumlah pengadaan alat uji

b. Maksud

Maksud dari Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk memberikan kelengkapan alat uji mekanik Pengujian Kendaraan Bermotor seiring dengan perkembangan teknologi tinggi.

c. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor akan dilakukan secara online dalam meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor.

d. Sasaran

Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor adalah meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor.

e. Target

Target Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pengadaan Peralatan Alat Uji.

f. Penganggaran

g. Output

Outputnya adalah peralatan alat uji dan sistem pelayanan online

h. Outcomenya adalah meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor

15. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik adalah sebagai upaya penegakan aturan bagi kendaraan wajib uji dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran guna menekan/mengurangi tingkat kecelakaan serta kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pembinaan kepada para pengemudi kendaraan wajib uji, mengenai dampak yang ditimbulkan akibat tidak memenuhi standar laik jalan terhadap keselamatan dirinya maupun pengguna lalu lintas lainnya.

Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018 – 2022 adalah melaksanakan uji petik secara berkala dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas.

a. Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini jumlah jumlah pelaksanaan uji petik

b. Maksud

Maksud dari Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk memberikan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

c. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor.

d. Sasaran

Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor wajib uji.

e. Target

Target Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pengadaan Peralatan Alat Uji.

f. Output

Outputnya adalah terdatanya kendaraan laik jalan

g. Outcomenya adalah meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor

16. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/JuruMudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang.

a. Indikator kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/JuruMudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang adalah jumlah terlaksananya kegiatan ramp check dan pemeriksaan kesehatan sopir.

b. Maksud Penyuluhan Bagi Para Sopir/JuruMudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang adalah meningkatkn kesehtan juru mudi

c. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan kelaikan dari Armada Angkutan yang melayani masyarakat Kota Cimahi dan juga kesiapan kesehatan dari paraSupir/Juru Mudi yang dilaksanakan dengan cara melakukan Inspeksi (*ramp check*) terhadap angkutan penumpang umum dan angkutan barang dan pemeriksaan terhadap kesehatan sopir angkutan umum.

d. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan/menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan penumpang umum dan angkutan barang serta terselenggaranya pelayanan angkutan yang tertib dan berkeselamatan.

e. Sasaran Kegiatan

AdapunSasaran pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Kendaraan Angkutan Karyawan dan Barang,
- Kendaraan Angkutan Mudik Lebaran,

- Juru Mudi/Supir angkutan dan Awak Angkutan Penumpang Umum
- f. Target
Target kegiatan ini adalah pemeriksaan kesehatan sebanyak 2 kali dan ramp check sebanyak 2 kali.
 - g. Output adalah Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan sopir dan ramp check
 - h. Outcome adalah meningkatnya keselamatan lalu lintas

17. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini, yaitu dokumen data base angkutan orang dan barang.
- b. Maksud
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data angkutan, baik itu angkutan orang maupun barang yang ada di wilayah Kota Cimahi yang dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi/pengumpulan data-data angkutan di Kota Cimahi.
- c. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh database angkutan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam rangka penataan dan pengembangan angkutan di Kota Cimahi untuk menciptakan pelayanan angkutan yang tertib dan berkeselamatan.
- d. Sasaran Kegiatan
Adapun Sasaran Kegiatan Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018 -2022 yaitu Pengusaha, Perusahaan dan Badan Hukum angkutan orang yang terdiri angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta angkutan barang.
- e. Target
Target kegiatan ini adalah tersusun dokumen data base pelayanan jasa angkutan
- f. Output adalah dokumen data base angkutan
- g. Outcome adalah meningkatnya pelayanan angkutan.

18. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di jalan Raya

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.

Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan Kepolisian Resor Cimahi, KODIM 0609 Cimahi, Subdenpom Cimahi, Subgarnisun Cimahi dan dibantu oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Kejaksaan Negeri Cimahi.

b. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap angkutan terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan administrasi operasional angkutan

c. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transportasi Kota Cimahi yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan serta merupakan upaya preventif guna menghindari kesemrawutan lalu lintas.

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018- 2022, yaitu kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi maupun melintas di Kota Cimahi.

e. Target

Target kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum sebanyak 6 kali.

f. Output

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum sebanyak 6 kali.

g. Outcome

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya keselamatan lalu lintas.

19. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan sosialisasi pelayanan angkutan orang dan barang.

b. Maksud

Adapun maksud penyusunan kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan yaitu melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan angkutan, baik angkutan orang maupun angkutan barang.

c. Tujuan

Tujuannya adalah agar seluruh penyelenggara angkutan khususnya di Kota Cimahi memahami tentang transportasi yang berkeselamatan, standar pelayanan angkutan (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan transportasi serta etika dalam berlalulintas.

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2018 - 2022 yaitu para penyelenggara angkutan yang terdiri dari angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

- Sosialisasi Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Sosialisasi Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek
- Sosialisasi Pelayanan Angkutan Barang

e. Target

Target dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi sebanyak 6 kali

f. Output dari kegiatan adalah terlaksanakannya sosialisasi pelayanan angkutan orang dan barang sebanyak 6 kali.

g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kesadaran keselamatan berlalu lintas.

20. Kegiatan Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan mudik gratis dan pengawasan dan sosialisasi terhadap angkutan orang dan barang.

b. Maksud

Maksud dari penyusunan kegiatan ini yaitu melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap angkutan penumpang umum dan angkutan barang serta pemberian pelayanan berupa penyediaan angkutan gratis pada saat mudik lebaran dan juga uji coba pengembangan trayek baru angkutan perkotaan di Kota Cimahi.

c. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan ini adalah terselenggaranya pelayanan angkutan yang teratur, tertib dan berkeselamatan.

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2018-2022 yaitu angkutan umum yang terdiri angkutan perkotaan dan angkutan karyawan, angkutan barang, angkutan gratis mudik lebaran, pengusaha dan supir angkutan serta masyarakat pengguna angkutan umum.

- Sosialisasi Pengembangan Trayek Perkotaan
- Uji Coba Pengembangan Trayek Perkotaan
- Pengawasan Angkutan Pada Perusahaan
- Pelepasan Mudik Gratis Lebaran

e. Target

Target kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi dan mudik gratis.

f. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya mudik gratis.

g. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan jasa angkutan.

21. Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal

a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pembangunan halte/shelter.

b. Maksud

Maksud kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan pelayanan angkutan dengan penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan membangun tempat pemberhentian angkutan umum (halte/shelter).

c. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang dan angkutan umum serta mendukung program-program yang ada bagi Pemerintahan Kota Cimahi.

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2017 – 2022, yaitu pembangunan halte/shelter dan pemeliharaan di ruas jalan yang dilalui angkutan umum di wilayah Kota Cimahi.

- Pemeliharaan Halte/Shelter
- Konsultasi Perencanaan Shelter

- Belanja Modal Pembangunan Shelter
 - Konsultansi Pengawasan Shelter
- e. Target
- Target dari kegiatan ini adalah pemeliharaan dan pembangunan shelter.
- f. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan shelter dan pembangunan shelter.
- g. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan jasa angkutan

22. Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum.

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penacapaian kegiatan ini adalah jumlah terpasangnya lampu penerangan baik PJU, PJL maupun PJG.
- b. Maksud
- Maksud kegiatan ini yaitu Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan antara lain lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), dan Penerangan Jalan Gang (PJU Gang).
- c. Tujuan
- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Cimahi.
- d. Sasaran
- Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan melalui pengadaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan / PJU gang
- e. Target
- Target dari kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum adalah
- PJU
 - PGL
 - PJG
- f. Output dari kegiatan ini adalah terpasangnya titik PJU,PJG, dan PJL
- g. Outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

23. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan jalan Umum.

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), dan Penerangan Jalan Gang
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan antara lain lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), dan Penerangan Jalan Gang.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan melalui pengadaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan / jalan gang sehingga memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Cimahi.
- d. Sasaran
Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah ada baik Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan / PJU gang.
- e. Target dari kegiatan ini terpeliharanya fasilitas Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan / PJU gang.
- f. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan / PJU gang.
- g. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas .

24. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan pemilihan sopir teladan.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab sopir/juru mudi tentang lalu lintas dan keselamatan lalu lintas.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan keselamatan lalu lintas.
- d. Target dari kegiatan ini terlaksananya pemilihan sopir teladan setiap tahun.
- e. Sasaran dari kegiatan adalah sopir penumpang
- f. Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya sopir teladan
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya keselamatan penumpang

25. Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di Terminal

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terlaksananya sewa Pasar Antri, pengelolaan terminal Pasar Atas dan Pasar Cimindi.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab supir/juru mudi tentang lalu lintas dan keselamatan lalu lintas.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelayanan angkutan
- d. Target dari kegiatan ini adalah sewa terminal Pasar Antri, pengelolaan terminal Pasar Atas dan Pasar Cimindi
- e. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas pelayanan angkutan
- f. Output adalah terlaksananya sewa Pasar Antri, pengelolaan Pasar Atas dan Pasar Cimindi.
- g. Outcome adalah terfasilitasi pelayanan angkutan

26. Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terbangunnya gedung Terminal tipe C
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan terminal.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah aksesibilitas pelayanan angkutan
- d. Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan terminal Cibeber
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah pembangunan Terminal C
- f. Output dari kegiatan adalah Terbangunannya Gedung Terminal C
- g. Outcome dari kegiatan adalah terfasilitasi pelayanan angkutan

27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Terminal/Pelabuhan

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan terminal Pasar Atas dan Pasar Cimindi.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi pelayanan terminal.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan angkutan
- d. Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan terminal Pasar Cimindi dan Pasar Atas setiap tahun

- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan Terminal Pasar Atas dan Cimindi
- f. Output dari kegiatan adalah terpeliharanya Terminal Pasar Atas dan Cimindi
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya pelayanan angkutan

28. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terfasilitasi kebutuhan telepon dan listrik.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terlaksanakannya pembayaran telepon dan listrik setiap bulan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan telepon dan listrik
- f. Output dari kegiatan adalah Pembayaran telepon dan listrik setiap bulan
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

29. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terfasilitasi kebutuhan perlindungan kendaraan bermotor.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah perlindungan kendaraan bermotor
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2
- f. Output dari kegiatan adalah Asuransi kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

30. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah tersajinya laporan keuangan triwulan dan semesteran Dinas Perhubungan.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur

- d. Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan triwulan dan semesteran
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah Laporan keuangan triwulan dan semesteran
- f. Output dari kegiatan adalah dokumen Laporan keuangan triwulan dan semesteran
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

31.Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan realisasi pelaksanaan kegiatan
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan peralatan dan kebersihan kantor.
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
- f. Output dari kegiatan adalah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

32. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi peralatan kantor
- d. Target dari kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan dan kebersihan kantor.
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah peralatan kantor
- f. Output dari kegiatan adalah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

33.Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah Tersedianya Alat Tulis kantor.
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.

- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Alat Tulis Kantor .
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan Alat Tulis kantor
- f. Output dari kegiatan adalah Alat Tulis Kantor
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

34. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy .
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Barang Cetak dan Foto Copy .
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan Barang Cetak dan Foto Copy
- f. Output dari kegiatan adalah Barang Cetak dan Foto Copy
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

35. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah Tersedianya komponen listrik .
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya komponen listrik.
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan komponen listrik
- f. Output dari kegiatan adalah komponen listrik
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

36. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah Tersedianya buku bacaan dan koran .
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya buku bacaan dan koran.

- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan buku bacaan dan koran
- f. Output dari kegiatan adalah buku bacaan dan koran
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

37. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah Tersedianya bahan logistic (natura) .
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya bahan logistic (natura).
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan bahan logistic (natura)
- f. Output dari kegiatan adalah bahan logistic (natura)
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

38. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah Tersedianya makan dan minum rapat dan kantor
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya makan dan minum rapat dan kantor
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan makan dan minum rapat dan kantor
- f. Output dari kegiatan adalah makan dan minum rapat dan kantor
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

39. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi
- f. Output dari kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

40. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan kendaraan dinas/operasional
- f. Output dari kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas/operasional
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

41. Keadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah pengadaan perlengkapan kantor
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan perlengkapan kantor
- f. Output dari kegiatan adalah perlengkapan kantor
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

42. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah pemeliharaan gedung kantor
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpelihara gedung kantor
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah gedung kantor
- f. Output dari kegiatan adalah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor

- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

43. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bendaraan Dinas/Operasional

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedia kebutuhan BBM dan pelumas
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan BBM dan pelumas
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan BBM dan pelumas
- f. Output dari kegiatan adalah BBM dan pelumas
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

44. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedia kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya
- f. Output dari kegiatan adalah pakaian dinas dan perlengkapannya
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

45. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedia kebutuhan pakaian kerja lapangan
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan pakaian kerja lapangan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan pakaian kerja lapangan
- f. Output dari kegiatan adalah pakaian kerja lapangan
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

46. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedia kebutuhan pakaian batik
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan pakaian batik
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan pakaian batik
- f. Output dari kegiatan adalah pakaian batik
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

47. Kegiatan Pembinaan Pegawai

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan terhadap THL
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan pembinaan THL.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja THL
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan pembinaan THL
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan pembinaan THL
- f. Output dari kegiatan adalah pelaksanaan pembinaan THL
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja THL

48. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah terlaksananya diklat/pelatihan
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kebutuhan aparatur.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur
- d. Target dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan diklat/pelatihan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah kebutuhan diklat/pelatihan
- f. Output dari kegiatan adalah pelaksanaan diklat/pelatihan
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

49. Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelaporan
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan kegiatan
- d. Target dari kegiatan ini adalah laporan realisasi kegiatan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah realisasi kegiatan
- f. Output dari kegiatan adalah laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPI, LPPD
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

50. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi keuangan
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan kegiatan
- d. Target dari kegiatan ini adalah laporan realisasi keuangan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah realisasi keuangan kegiatan
- f. Output dari kegiatan adalah keuangan semesteran
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

51. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi keuangan
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan kegiatan
- d. Target dari kegiatan ini adalah laporan realisasi keuangan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah realisasi keuangan kegiatan

- f. Output dari kegiatan adalah laporan prognosis keuangan
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

52. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi keuangan pada akhir tahun
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan kegiatan
- d. Target dari kegiatan ini adalah laporan realisasi keuangan akhir tahun
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah realisasi keuangan kegiatan
- f. Output dari kegiatan adalah laporan keuangan akhir tahun
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

53. Kegiatan monitoring dan evaluasi

- a. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan ini adalah tersedianya laporan monev pelaksanaan kegiatan
- b. Maksud dari kegiatan ini adalah menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi
- c. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan kegiatan
- d. Target dari kegiatan ini adalah laporan realisasi kegiatan fisik dan keuangan
- e. Sasaran dari kegiatan ini adalah realisasi fisik dan keuangan kegiatan
- f. Output dari kegiatan adalah laporan fisik dan keuangan kegiatan
- g. Outcome dari kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas merupakan konsekuensi logis dalam menentukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, karena adanya perubahan struktur organisasi dan terpilihnya walikota tahun 2017 - 2022. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan melalui serangkaian kegiatan program yang dirumuskan dalam perencanaan strategis 2012-2017 Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Dengan menentukan Visi dan Misi memahami indikator dan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon Dinas Perhubungan terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Perencanaan Strategik membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen organisasi yang harus diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dan kebijaksanaan Strategis Kota Cimahi adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam Perencanaan strategis.

Agar perencanaan Strategis dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien maka diperlukan perhatian terhadap tiga hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis yang disusun harus konsisten dan harus bermanfaat dari berbagai peluang dan harus memperkecil atau menghilangkan dampak negatif.
2. Perencanaan strategis harus memperhatikan kemampuan realistis Dinas Perhubungan
3. Perencanaan strategis harus memperoleh dukungan dari mulai puncak Pimpinan sampai pelaksana dibawahnya agar pelaksanaannya menjadi sukses.

Cimahi, 2018

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI

RUSWANTO, ATD

Pembina Utama

NIP. 19691018 199403 1 006

